



Rencana Kinerja Tahunan

Tahun 2025

BADAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (RKT BKPK) Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen perencanaan turunan dari dokumen perencanaan kinerja 5 (lima) tahunan (Renstra dan Rencana Aksi Program (RAP), serta penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). RKT BKPK Tahun 2025 memuat sasaran, indikator kinerja dan target yang harus dicapai BKPK pada tahun 2025 serta anggaran yang dialokasikan. Dokumen RKT diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan perencanaan, pengukuran kinerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di BKPK sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien untuk menunjang dan berkontribusi pencapaian tujuan pembangunan bidang kesehatan.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan pemikiran dan kerja kerasnya dalam penyusunan RKT BKPK Tahun 2025.

Jakarta, Oktober 2025

Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan



Prof. Asnawi Abdullah, Ph.D.

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG.....	4
B. STRUKTUR ORGANISASI.....	5
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN RENCANA KEGIATAN.....	8
A. VISI	8
B. MISI	8
C. TUJUAN	10
D. SASARAN.....	11
E. RENCANA KEGIATAN	12
BAB III. RENCANA KINERJA	15
A. INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TAHUN 2025	15
B. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025	42
BAB IV. PENUTUP	43
LAMPIRAN I	
LAMPIRAN II	
DAFTAR KONTRIBUTOR	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Struktur Organisasi BKPK.....	6
Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan 2025-2029	11
Tabel III.1 Rencana Kinerja BKPK Tahun 2025	16
Tabel III.2 Rencana Anggaran BKPK Tahun 2025	42

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap tahun Kementerian/Lembaga harus menyusun rencana kerja Kementerian/Lembaga yang mengacu pada dokumen rencana strategis masing-masing Kementerian/Lembaga.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan program dan kegiatan, merupakan dokumen turunan dari dokumen perencanaan dan penganggaran 5 (lima) tahunan yaitu Rencana Strategis Kementerian Kesehatan pada tingkat Kementerian/Lembaga dan Rencana Aksi Program (RAP) pada tingkat Eselon I; dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) pada tingkat Unit Kerja.

RKT merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L). RKT dibuat dalam bentuk kegiatan rinci hasil penuangan matriks Renja K/L. Dalam perencanaan kinerja tersebut, ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan serta anggaran yang dialokasikan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi unit kerja untuk mencapainya dalam periode satu tahun.

Keterkaitan RKT dengan Renja-KL harus tercermin pada penggunaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program hingga indikator kinerja, target dan rencana alokasi anggaran tahun anggaran berjalan. RKT dan Renja-KL merupakan dokumen yang saling melengkapi dari sisi penjabaran kegiatan dan usulan alokasi anggarannya. Dalam kaitan ini, RKT melengkapi secara rinci menuangkan perencanaan anggaran yang tercermin dalam dokumen Renja-KL.

RKT BKPK Tahun 2025 memuat sasaran kinerja, program kinerja, indikator kinerja, target kinerja periodik, kegiatan/aktivitas dan rincian anggaran BKPK tahun 2025. Dalam penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dengan pendekatan perencanaan penganggaran berbasis kinerja,

langkah-langkah atau tahapan tersebut dijabarkan dalam bentuk Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), sampai dengan tahapan pelaksanaan atau pencapaian suatu output. Selain itu, Dokumen RKT dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan serta evaluasi capaian kinerja pada BKPK.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini disusun dengan tujuan:

1. sebagai acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran satuan kerja yang lebih rinci (Rencana Kerja Anggaran-Kementerian/Lembaga/RKA-KL)
2. memberikan gambaran pelaksanaan Program dan Kegiatan BKPK Tahun 2025, dan
3. dokumen pengendalian serta pengawasan pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tahun 2025 dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Penyusunan dokumen RKT diharapkan memberikan gambaran keselarasan perencanaan kegiatan mulai dari rencana kerja jangka menengah atau 5 (lima) tahunan (RPJMN, Renstra, RAP, dan RAK 2025-2029), sampai dengan rencana kerja tahunan (Renja K/L, RKT, dan RKA-K/L). Dengan demikian, target kinerja tahunan dan jangka menengah dapat dicapai dengan baik.

B. STRUKTUR ORGANISASI

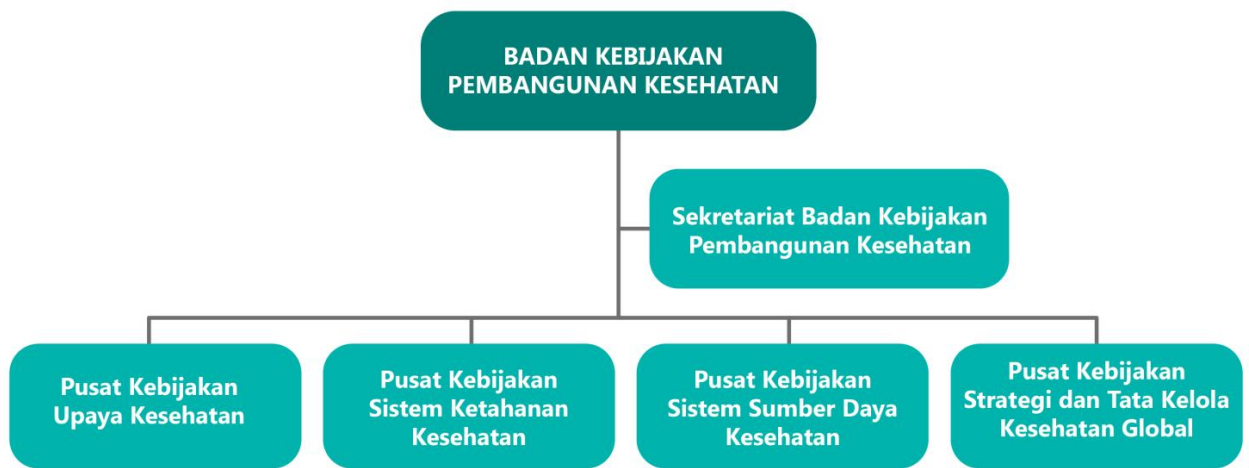
Tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, BKPK mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan. BKPK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penguatan kebijakan pembangunan kesehatan;
- b. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan;
- c. pelaksanaan integrasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan kesehatan;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kebijakan pembangunan kesehatan;

- e. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan organisasi BKPK terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan;
- c. Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan;
- d. Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan; dan
- e. Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global.



Sumber: Permenkes no. 21 tahun 2024

Gambar I.1 Struktur Organisasi BKPK

Ruang lingkup kebijakan BKPK dijabarkan dalam pelaksanaan tugas di masing-masing Pusjak yang menyesuaikan dengan enam pilar transformasi kesehatan dan penugasan terkait dari Menteri Kesehatan sebagai berikut:

1. Sekretariat BKPK

Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Badan

2. Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan

Melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan di bidang upaya kesehatan.

3. Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan

Melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan di bidang sistem ketahanan kesehatan.

4. Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan

Melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan di bidang sistem sumber daya kesehatan.

5. Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global

Melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan di bidang strategi dan tata kelola kesehatan global

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN RENCANA KEGIATAN

A. VISI

Visi nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Visi Presiden 2025-2029, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029, yakni “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Untuk melaksanakan visi tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkannya dalam visi bidang kesehatan, yaitu “Masyarakat yang Sehat dan Produktif Guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045”.

Visi tersebut diwujudkan dengan berlandaskan pada Tiga Pilar Pembangunan, yakni, (i) pemenuhan layanan dasar, (ii) pembangunan modal manusia, serta (iii) pembangunan modal sosial budaya. Ketiga pilar tersebut ditopang oleh pendekatan siklus hidup, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, serta penduduk tumbuh seimbang. Pilar utama dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang produktif adalah intervensi secara konkret dalam pendidikan dan kesehatan.

Pada bidang kesehatan, intervensi kunci terdiri dari pencegahan stunting serta peningkatan angka kelangsungan hidup anak dan dewasa. Strategi pencegahan stunting difokuskan pada 1000 hari pertama kehidupan. Strategi peningkatan angka kelangsungan hidup anak dan dewasa diwujudkan melalui peningkatan akses dan manajemen terpadu pelayanan kesehatan; penguatan deteksi dini penyakit, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan kesehatan jiwa disertai investasi pelayanan primer untuk perluasan upaya promotif dan preventif kesehatan serta pemenuhan kebutuhan sumber daya kesehatan.

B. MISI

Selain itu, Presiden Prabowo Subianto menetapkan delapan misi Presiden yang disebut Asta Cita tahun 2025- 2029, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

Guna memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas, Kementerian Kesehatan menjabarkan misi Presiden itu sebagai berikut:

1. mewujudkan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup;
2. memenuhi layanan kesehatan yang baik, adil dan terjangkau;
3. mengimplementasikan sistem ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif;
4. menguatkan tata kelola dan pembiayaan kesehatan yang efektif, adil dan berkelanjutan;

5. mengembangkan teknologi kesehatan yang maju; dan Tujuan Strategis;
6. mewujudkan Kementerian Kesehatan yang agile, efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kementerian Kesehatan di atas, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai selama periode 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Masyarakat sehat di setiap siklus hidup;
- 2) Layanan Kesehatan yang baik, adil dan terjangkau;
- 3) Sistem Ketahanan Kesehatan yang tangguh dan responsif;
- 4) Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan yang efektif, adil, dan berkelanjutan;
- 5) Teknologi Kesehatan yang maju; dan
- 6) Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien.

C. TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi, ditetapkan 6 tujuan Kementerian Kesehatan tahun 2025-2029 yaitu:

1. Masyarakat sehat di setiap siklus hidup;
2. Layanan Kesehatan yang baik, adil dan terjangkau;
3. Sistem Ketahanan Kesehatan yang tangguh dan responsif;
4. Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan yang efektif, adil, dan berkelanjutan;
5. Teknologi Kesehatan yang maju;
6. Kementerian Kesehatan yang agile, efektif, dan efisien.

Untuk mendukung tujuan di atas, diperlukan layanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan cakupan layanan esensial menjadi fokus utama Kementerian Kesehatan. Akses terhadap layanan yang adil akan mengurangi kesenjangan, mempercepat deteksi dan penanganan penyakit, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan. Dalam situasi darurat seperti pandemi, sistem kesehatan yang tangguh dan responsif juga dibutuhkan. Tercapainya

tujuan-tujuan tersebut juga turut ditentukan oleh efektivitas pengelolaan dan pembiayaan kesehatan. Di sisi lain, kemajuan teknologi kesehatan juga diukur dari persentase populasi yang menggunakan sistem informasi kesehatan nasional. Kementerian Kesehatan juga berkomitmen untuk membangun tata kelola kelembagaan yang responsif terhadap dinamika global, nasional, dan lokal melalui penerapan prinsip-prinsip birokrasi dan layanan yang agile, efektif, dan efisien.

D. SASARAN

Dalam rangka mencapai Tujuan Kementerian Kesehatan, maka ditetapkan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

Tabel II.1 Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan 2025-2029

Tujuan		Sasaran Strategis	
1	Masyarakat sehat di setiap siklus hidup	1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Promotif dan Preventif
		1.2	Meningkatnya literasi kesehatan masyarakat
2	Layanan Kesehatan yang baik, adil, dan terjangkau	2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer, lanjutan dan labkes
3	Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh dan Responsif	3.1	Meningkatnya kesiapsiagaan & tanggap darurat kesehatan
4	Tata Kelola dan Pembiayaan Kesehatan yang efektif, adil dan berkelanjutan	4.1	Meningkatnya kualitas tata kelola dan pembiayaan kesehatan di pusat dan daerah
5	Teknologi Kesehatan yang Maju	5.1	Meningkatnya kualitas ekosistem teknologi kesehatan dan uji klinis
6	Kementerian Kesehatan yang <i>agile</i> , efektif dan efisien	6.1	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan

E. RENCANA KEGIATAN

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) sebagai unsur pendukung di Kementerian Kesehatan bertugas melaksanakan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kesehatan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029, BKPK merumuskan sasaran program yang diarahkan pada dua aspek utama, yaitu sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, serta peningkatan kecukupan, efektivitas, efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan pendanaan kesehatan. Sasaran program tersebut dikelola bersama oleh unit-unit BKPK yang dijabarkan sebagai berikut:

Program: Kebijakan Pembangunan Kesehatan

1. Sasaran Program: Meningkatnya Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah

Sinkronisasi kebijakan kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan salah satu prasyarat utama dalam memastikan konsistensi pencapaian indikator kesehatan nasional. Melalui sasaran ini, BKPK berfokus pada peningkatan keterpaduan kebijakan lintas level pemerintahan agar seluruh indikator kesehatan nasional dapat dicapai secara seragam serta peningkatan kualitas kebijakan kesehatan. Indikator utama yang digunakan meliputi:

- **IKP 26.2: Persentase daerah yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional**, dengan target 15% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan upaya penguatan advokasi dan asistensi kebijakan ke daerah. Pencapaian indikator ini akan mendorong terbentuknya regulasi daerah yang selaras dengan kebijakan nasional, serta memperkuat implementasi indikator kesehatan di tingkat lokal. Pengukuran akan dilakukan berbasis data kebijakan daerah yang terekam di Data Pemda, Kemendagri JDIH.
- **IKP 26.3: Persentase Kabupaten/Kota dengan capaian SPM Kesehatan minimal 90%**, dengan target 50% di tahun 2025. Indikator ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sebagai bentuk kewajiban dasar pelayanan publik. Ini menuntut kebijakan yang efektif dalam mendorong akuntabilitas daerah, dimonitor melalui data Kemendagri.

- **IKP 26.4: Nilai kualitas kebijakan Kementerian Kesehatan**, dengan target nilai 83 pada tahun 2025. Peningkatan nilai kualitas kebijakan dimaksudkan untuk menjamin tersusunnya kebijakan yang lebih responsif, berbasis bukti, serta mendukung pelaksanaan program kesehatan secara nasional.

Dengan demikian, sasaran ini menekankan pentingnya konsistensi regulasi, harmonisasi kebijakan pusat-daerah, serta peningkatan kualitas kebijakan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

2. Sasaran Program: Meningkatnya Kecukupan, Efektivitas, Efisiensi, Keadilan, dan Keberlanjutan Pendanaan Kesehatan

Pendanaan kesehatan yang memadai dan berkelanjutan merupakan prasyarat penting untuk menjamin terselenggaranya sistem kesehatan nasional yang kuat. Sasaran program ini diarahkan pada penguatan sistem pendanaan kesehatan yang efisien dan berkelanjutan dalam sistem kesehatan baik melalui optimalisasi belanja pemerintah, peningkatan investasi, maupun pencapaian target global kesehatan. Indikator yang digunakan meliputi:

- **IKP 27.3: Persentase kabupaten/kota yang mengikuti bauran belanja ideal di sektor kesehatan**, dengan target 10% pada tahun 2025. Indikator ini akan mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah agar alokasi belanja kesehatan lebih efektif dan proporsional sesuai kebutuhan. Hal ini menunjukkan adanya upaya penguatan akuntabilitas dan tata kelola fiskal di daerah.
- **IKP 28.1: Persentase kenaikan investasi langsung di sektor kesehatan**, dengan target 19% pada tahun 2025. Peningkatan investasi diharapkan mampu memperkuat pembiayaan pembangunan kesehatan melalui kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk swasta, dan mendukung pertumbuhan industri kesehatan nasional.
- **IKP 28.2: Persentase pencapaian target global kesehatan pada tingkat nasional**, dengan target 50% pada tahun 2025. Indikator ini menunjukkan kontribusi Indonesia dalam pencapaian target kesehatan global sesuai komitmen internasional dengan menggunakan data dari Kemenkes sebagai sumber evaluasi.

Melalui sasaran ini, BKPK berupaya memastikan keberlanjutan pembiayaan kesehatan dengan pendekatan bauran pendanaan, peningkatan investasi, serta kontribusi aktif dalam pencapaian target kesehatan global.

Dengan dirumuskannya sasaran program sebagaimana diuraikan di atas, BKPK berkomitmen untuk mendorong terwujudnya tata kelola kebijakan kesehatan yang lebih harmonis antara pusat dan daerah, sekaligus memastikan tersedianya pendanaan kesehatan yang cukup, efektif, efisien, adil, dan berkelanjutan.

BAB III. RENCANA KINERJA

A. RENCANA KINERJA BKPK TAHUN 2025

Rencana kinerja BKPK tahun 2025 mengacu pada dokumen Rencana Strategis yang tertuang pada Permenkes Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029. Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029, terdapat enam tujuan dan tujuh sasaran strategis yang akan dicapai oleh Kementerian Kesehatan dalam kurun waktu lima tahun. BKPK mendukung tujuan ke-5, yaitu Tata Kelola dan Pendanaan Kesehatan yang efektif, pada sasaran strategis ke 1 dan 2, yakni 5.1 Meningkatnya keselarasan kebijakan dan prioritas bidang kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah; dan 5.2 Meningkatnya kualitas pendanaan kesehatan yang berkelanjutan; tujuan ke 7, yakni 7 Kementerian Kesehatan yang agile, efektif dan efisien; serta sasaran strategis ke-1, yakni 7.1 Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian Kesehatan. Indikator Kinerja BKPK tahun 2025 dirinci pada tabel berikut.

Tabel III.1 Rencana Kinerja BKPK Tahun 2025

(dalam ribu rupiah)

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
Program : Pelayanan Kesehatan dan JKN (seluruh anggaran BKPK TA 2025 pada Program Yankes JKN diblokir)			
Sasaran Program : Terpenuhinya Pembiayaan Kesehatan dalam mencapai UHC			
IKP: Persentase Belanja Kesehatan Out of Pocket Masyarakat Berpengeluaran 40% terbawah		3,98%	
Sasaran Program: Meningkatnya Kecukupan Pendanaan Kesehatan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan			
IKP 27.1 Persentase Pertumbuhan Belanja Kesehatan dari Sektor Publik		5%	
IKP 27.2 Persentase Pertumbuhan Belanja Kesehatan dari Sektor Non Publik		1%	
Sasaran Kegiatan: Terlaksananya penyiapan implementasi pembiayaan dan jaminan kesehatan			
IKK 19.1.2 Persentase asuransi kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan		100%	
	Klasifikasi Rincian Output: 6804.AEA Koordinasi	4 Kegiatan	

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Rincian Output: 6804.AEA.001 Audit Koding di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut	1 Kegiatan	1.044.220
	Rincian Output: 6804.AEA.002 Fasilitasi Penyusunan Regulasi dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional	1 Kegiatan	437.450
	Rincian Output: 6804.AEA.003 Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Pengalokasian dan Implementasi Pembiayaan Kesehatan	1 Kegiatan	1.296.546
	Rincian Output: 6804.AEA.004 Fasilitasi Dewan Pertimbangan Klinis	1 Kegiatan	549.840
	Klasifikasi Rincian Output: 6804.AEF Sosialisasi dan Diseminasi	3000 orang	
	Rincian Output: 6804.AEF.001 Orang yang Mendapatkan Advokasi Pembiayaan Kesehatan untuk Kegiatan Promotif dan Preventif	3.000 orang	1.777.514
	Klasifikasi Rincian Output: 6804.DCM Pelatihan Bidang Kesehatan	300 orang	

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Rincian Output: 6804.DCM.001 Tenaga Koder FKRTL yang Mengikuti Pelatihan Koding dalam Program JKN	300 orang	4.205.010
	Klasifikasi Rincian Output: 6804.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1 Laporan	
	Rincian Output: 6804.FAE.001 Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	1 Laporan	240.000
	Rincian Output: 6804.FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	6 Daerah (Prov/Kab/Kota)	
	Rincian Output: 6804.FBA.001 Penguatan Pelaksanaan Health Accounts (PHA/DHA) di Daerah	6 Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.928.980
Program: DS.Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan			
Sasaran Program : Meningkatnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah			
IKP 26.2 Persentase daerah yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional		15%	
IKP 26.3 Persentase Kabupaten/Kota dengan capaian SPM Kesehatan minimal 90%		50%	

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
IKP 26.4 Nilai kualitas kebijakan Kementerian Kesehatan		83	
Sasaran Program: Meningkatnya kecukupan, efektifitas, efisiensi, keadilan dan keberlanjutan pendanaan kesehatan			
IKP 27.3 Persentase kabupaten/kota yang mengikuti bauran belanja ideal di sektor kesehatan		10%	
IKP 28.1 Persentase kenaikan investasi langsung di sektor kesehatan		19%	
IKP 28.2 Persentase pencapaian target global kesehatan pada tingkat nasional		50%	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kebijakan upaya kesehatan berbasis bukti			
IKK 26.2.2 Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional pada wilayah I		15%	
	Klasifikasi Rincian Output: 6833.AEA Koordinasi		
	Rincian Output: 6833.AEA.003 Penyusunan Perencanaan Kajian Kesehatan di Bidang Upaya Kesehatan	1 Kegiatan	1.000.778
IKK 26.4.1 Persentase analisis kebijakan di bidang Upaya Kesehatan		80%	

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Klasifikasi Rincian Output 6833.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	31 RK	
	Rincian Output: 6833.ABG.011 Kajian Pengembangan Kebijakan Baru Bidang Upaya Kesehatan	5 RK	933.350
	Rincian Output: 6833.ABG.012 Kajian Evaluasi Kebijakan Tata Kelola dan Penguatan Mutu Layanan Kesehatan Primer	4 RK	1.100.000
	Rincian Output: 6833.ABG.013 Kajian Evaluasi Kebijakan Tata Kelola dan Penguatan Mutu Layanan Kesehatan Rujukan	4 RK	1.100.000
	Rincian Output: 6833.ABG.014 Kajian Evaluasi Kebijakan Program Kesehatan Masyarakat	4 RK	1.100.000
	Rincian Output: 6833.ABG.015 Kajian Evaluasi Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	4 RK	1.100.000
	Rincian Output: 6833.ABG.016 Kajian Evaluasi Kebijakan Promosi Kesehatan, Deteksi Dini dan Pengendalian PTM	4 RK	990.208

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Rincian Output: 6833.ABG.017 Evaluasi Kebijakan dan Strategi Upaya Kesehatan Masyarakat	1 RK	188.830
	Rincian Output: 6833.ABG.018 Evaluasi Kebijakan dan Strategi Upaya Kesehatan Perseorangan	1 RK	100.000
	Rincian Output: 6833.ABG.019 Evaluasi Kebijakan dan Strategi Tata Kelola Mutu Fasyankes Primer	1 RK	100.000
	Rincian Output: 6833.ABG.020 Evaluasi Kebijakan dan Strategi Layanan Kesehatan Lanjutan dan Klinis	1 RK	171.624
	Rincian Output: 6833.ABG.021 Evaluasi Kebijakan dan Strategi Tata Kelola dan Mutu Fasyankes Lanjutan	1 RK	175.000
	Klasifikasi Rincian Output 6833.AEA Koordinasi	8 Kegiatan	
	Rincian Output: 6833.AEA.004 Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Bidang Upaya Kesehatan	1 Kegiatan	1.098.523

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Rincian Output: 6833.AEA.005 Quality Control Rancangan Regulasi Bidang Upaya Kesehatan	6 Kegiatan	800.010
	Klasifikasi Rincian Output 6833.PBG Kebijakan Bidang Kesehatan	1 RK	
	Rincian Output: 6833.PBG.004 Survei Konsumsi Makanan Individu	1 RK	75.280.000
	Rincian Output: 6833.PBG.005 Rekomendasi Kebijakan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Pemeriksaan Kesehatan Gratis	1 RK	1.460.221
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan berbasis bukti			
IKK 26.2.3 Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional pada wilayah II		15%	
	Klasifikasi Rincian Output: 6834.AEA Koordinasi	2 Kegiatan	
	Rincian Output: 6834.AEA.004 Penyusunan Perencanaan Kajian Kesehatan bidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	1 Kegiatan	550.230

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Rincian Output: 6834.AEA.007 Penyusunan Perencanaan Kajian Kesehatan di Bidang Sistem Ketahanan Kesehatan	1 Kegiatan	131.691
IKK 26.4.2 Persentase analisis kebijakan di bidang Sistem Ketahanan Kesehatan		80%	
	Klasifikasi Rincian Output 6833.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	21 RK	
	Rincian Output: 6834.ABG.041 Kajian Pengembangan Kebijakan Baru Bidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	4 RK	3.566.184
	Rincian Output: 6834.ABG.042 Kajian Evaluasi Kebijakan Sistem Ketahanan Alat Kesehatan	3 RK	1.173.826
	Rincian Output: 6834.ABG.043 Kajian Evaluasi Kebijakan Sistem Ketahanan Farmasi	3 RK	1.181.054
	Rincian Output: 6834.ABG.045 Kajian Evaluasi Kebijakan Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	3 RK	1.111.854

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Rincian Output: 6834.ABG.046 Kajian Evaluasi Kebijakan Penyediaan, Peningkatan Mutu, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	3 RK	1.111.854
	Rincian Output: 6834.ABG.047 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kebijakan Baru Bidang Sistem Ketahanan Kesehatan	1 RK	19.000
	Rincian Output: 6834.ABG.048 Rekomendasi Kebijakan Strategi Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan dan Perubahan Iklim	1 RK	72.860
	Rincian Output: 6834.ABG.049 Evaluasi Kebijakan Strategi Penanggulangan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan	1 RK	893.330
	Rincian Output: 6834.ABG.050 Evaluasi Kebijakan Strategi Imunisasi, Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan	1 RK	147.011
	Rincian Output: 6834.ABG.051 Evaluasi Kebijakan Sistem Ketahan dan Strategi Tata Kelola Keracunan	1 RK	65.621

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Klasifikasi Rincian Output: 6834.AEA Koordinasi	5 Kegiatan	
	Rincian Output: 6834.AEA.005 Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan bidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	1 Kegiatan	485.812
	Rincian Output: 6834.AEA.006 Quality Control Rancangan Regulasi bidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	3 Kegiatan	316.845
	Rincian Output: 6834.AEA.008 Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Bidang Sistem Ketahanan Kesehatan	1 Kegiatan	97.828
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kebijakan sistem sumber daya kesehatan berbasis bukti			
IKK 26.2.4 Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional pada wilayah III		15%	
	Klasifikasi Rincian Output: 6834.AEA Koordinasi	1 Kegiatan	
	Rincian Output: 6834.AEA.010 Penyusunan Perencanaan Kajian	1 Kegiatan	36.987

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Kesehatan Bidang Sistem Sumber Daya Kesehatan		
IKK 26.4.3 Persentase analisis kebijakan di bidang Sistem Sumber Daya Kesehatan		80%	
	Klasifikasi Rincian Output 6834.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	4 RK	
	Rincian Output: 6834.ABG.052 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kebijakan Baru Bidang Sistem Sumber Daya Kesehatan	1 RK	230.000
	Rincian Output: 6834.ABG.053 Rekomendasi Kebijakan dan Strategi SDM Kesehatan	1 RK	344.000
	Rincian Output: 6834.ABG.054 Rekomendasi Kebijakan dan Strategi Sistem Informasi Kesehatan	1 RK	640.000
	Rincian Output: 6834.ABG.055 Rekomendasi Kebijakan dan Strategi Integrasi Sumber Daya Kesehatan	1 RK	251.500
	Klasifikasi Rincian Output: 6834.AEA Koordinasi	1 Kegiatan	

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Rincian Output: 6834.AEA.011 Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Bidang Sistem Sumber Daya Kesehatan	1 Kegiatan	41.300
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kebijakan strategi dan tata kelola kesehatan global berbasis bukti			
IKK 26.3.1 Persentase capaian SPM Kesehatan kabupaten/kota yang telah divalidasi		10%	
	Klasifikasi Rincian Output: 6835.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1 Laporan	
	Rincian Output: 6835.FAE.001 Pemantauan dan Evaluasi Ketercapaian SPM Kesehatan	1 Laporan	
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kerja sama dan dukungan stakeholder dalam program kesehatan			
IKK 27.3.1 Pemenuhan pembiayaan untuk mendukung terpenuhinya SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang kesehatan		50 Kab/Kota	
	Klasifikasi Rincian Output: 6835.AEA Koordinasi		
	Rincian Output: 6835.AEA.005 Fasilitasi Penyusunan Kebijakan	1 Kegiatan	433.576

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Pengalokasian dan Implementasi Pembiayaan Kesehatan		
Sasaran Kegiatan: Tersedianya bahan kebijakan bidang Sistem Sumber Daya Kesehatan			
IKK 28.1.1 Persentase kenaikan investasi langsung kesehatan di bidang farmasi		12%	
	Klasifikasi Rincian Output 6835.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	2 RK	
	Rincian Output: 6835.ABG.018 Rekomendasi Kebijakan National Health Accounts	1 RK	2.128.813
	Rincian Output: 6835.ABG.019 Rekomendasi kebijakan kenaikan investasi kesehatan di bidang farmasi	1 RK	107.140
IKK 28.1.2 Persentase kenaikan investasi langsung kesehatan di bidang alat kesehatan		16%	
	Klasifikasi Rincian Output 6835.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	2 RK	
	Rincian Output: 6835.ABG.014 Rekomendasi Kebijakan Health Technology Assessment	1 RK	4.517.658

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Rincian Output: 6835.ABG.020 Rekomendasi kebijakan kenaikan investasi kesehatan di bidang alkes	1 RK	137.712
	Klasifikasi Rincian Output: 6835.AEA Koordinasi	5 Kegiatan	
	Rincian Output: 6835.AEA.001 Penyusunan Perencanaan Kajian Kesehatan Bidang Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	1 Kegiatan	491.475
	Rincian Output: 6835.AEA.002 Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Bidang Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	1 Kegiatan	837.800
	Rincian Output: 6835.AEA.003 Quality Control Rancangan Regulasi Bidang Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	3 Kegiatan	546.360
	Klasifikasi Rincian Output 6835.PBG Kebijakan Bidang Kesehatan	7 RK	
	Rincian Output: 6835.PBG.001 Rekomendasi Kebijakan Health Technology Assessment	6 RK	

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Rincian Output: 6835 PBG 002 Rekomendai kebijakan pendanaan kesehatan	1 RK	
IKK 28.1.3 Persentase kenaikan investasi langsung kesehatan di bidang fasilitas pelayanan kesehatan		25%	
	Klasifikasi Rincian Output 6835.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	8 RK	
	Rincian Output: 6835.ABG.011 Kajian Pengembangan Kebijakan Baru Bidang Pembiayaan Jaminan Kesehatan dan Desentralisasi Kesehatan	1 RK	509.880
	Rincian Output: 6835.ABG.012 Rekomendasi Kebijakan Penataan Ulang Manfaat dalam Program JKN	1 RK	800.150
	Rincian Output: 6835.ABG.013 Rekomendasi Kebijakan Sinergi Pembiayaan Pusat dan Daerah	2 RK	1.354.880
	Rincian Output: 6835.ABG.015 Rekomendasi Kebijakan INA Grouper dalam Program JKN	1 RK	1.093.850
	Rincian Output: 6835.ABG.016 Rekomendasi Kebijakan Annual	1 RK	1.222.252

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Review dan Evaluasi Tarif INA CBG dalam Program JKN		
	Rincian Output: 6835.ABG.017 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Metode Pembayaran di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama	1 RK	1.160.700
	Rincian Output: 6835.ABG.021 Rekomendasi kebijakan kenaikan investasi kesehatan di bidang fasyankes	1 RK	19.982
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kebijakan strategi dan tata kelola kesehatan global berbasis bukti			
IKK 26.2.5 Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional pada wilayah IV		15%	
	Klasifikasi Rincian Output: 6836.AEA Koordinasi	2 Kegiatan	
	Rincian Output: 6836.AEA.003 Penyusunan Perencanaan Kajian Kesehatan bidang kesehatan global dan teknologi kesehatan	1 Kegiatan	289.938
	Rincian Output: 6836.AEA.006 Penyusunan Perencanaan Kajian	1 Kegiatan	192.742

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Kesehatan bidang Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global		
IKK 26.4.4 Persentase analisis kebijakan di bidang Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global		80%	
	Klasifikasi Rincian Output 6835.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	18 RK	
	Rincian Output: 6836.ABG.031 Kajian Pengembangan Kebijakan Baru bidang Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	2 RK	393.240
	Rincian Output: 6836.ABG.032 Kajian Evaluasi Kebijakan Kesehatan Bilateral	2 RK	692.625
	Rincian Output: 6836.ABG.033 Kajian Evaluasi Kebijakan Kesehatan Regional	2 RK	693.638
	Rincian Output: 6836.ABG.034 Kajian Evaluasi Kebijakan Kesehatan Multilateral	2 RK	692.422
	Rincian Output: 6836.ABG.035 Kajian Evaluasi Kebijakan Hibah dan Pinjaman	2 RK	690.570

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Rincian Output: 6836.ABG.036 Kajian Evaluasi Kebijakan Bioteknologi	2 RK	687.742
	Rincian Output: 6836.ABG.037 Kajian Evaluasi Kebijakan Sistem Informasi Kesehatan	2 RK	692.422
	Rincian Output: 6836.ABG.038 Rekomendasi kebijakan pengembangan kebijakan baru bidang Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global	1 RK	175.150
	Rincian Output: 6836.ABG.039 Evaluasi Kebijakan Mitra Pembangunan	1 RK	156
	Rincian Output: 6836.ABG.040 Evaluasi Kebijakan Desentralisasi Kesehatan	1 RK	42.680
	Rincian Output: 6836.ABG.041 Evaluasi Kebijakan Transformasi Kesehata	1 RK	120.505
	Klasifikasi Rincian Output: 6836.AEA Koordinasi	2 Kegiatan	
	Rincian Output: 6836.AEA.005 Quality Control Rancangan	2 Kegiatan	335.920

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Regulasi bidang Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan		
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kerja sama dan dukungan stakeholder dalam program kesehatan			
IKK 28.2.1 Jumlah peran strategis Indonesia pada Ol/pertemuan internasional bidang kesehatan		17 Kegiatan	
	Klasifikasi Rincian Output: 6836.AEC Kerja sama		
	Rincian Output: 6836.AEC.005 Dokumen pinjaman hibah luar negeri	3 Kesepakatan	598.081
	Rincian Output: 6836.AEC.006 Dokumen kerja sama Bioteknologi dan Informatika Kesehatan	2 Kesepakatan	1.957.981
	Rincian Output: 6836.AEC.011 Dokumen kerja sama luar negeri regional bidang Kesehatan	3 Kesepakatan	3.058.641
	Rincian Output: 6836.AEC.012 Dokumen kerja sama luar negeri bilateral bidang Kesehatan	3 Kesepakatan	928.432
	Rincian Output: 6836.AEC.013 Kontribusi Indonesia pada	2 Dokumen	98.743.000

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	organisasi internasional non pemerintah		
	Rincian Output: 6836.AEC.014 Operasionalisasi ACPHEED	1 Dokumen	8.249.466
	Rincian Output: 6836.AEC.015 Dokumen mitra pembangunan kesehatan	1 Kesepakatan	680.660
	Klasifikasi Rincian Output: 6836.AEG Konferensi dan Event		
	Rincian Output: 6836.AEG.001 Tuan rumah penyelenggaraan pertemuan internasional	2 Kegiatan	6.114.791
	Rincian Output: 6836.AEG.003 Partisipasi aktif dalam Sidang Internasional Bilateral, Regional dan Multilateral Bidang Kesehatan	20 Kegiatan	6.524.031
IKK 28.2.2 Persentase target kesehatan nasional selaras dengan target global		80%	
	Klasifikasi Rincian Output: 6836.AEA Koordinasi	2 Kegiatan	
	Rincian Output: 6836.AEA.004 Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan bidang Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	1 Kegiatan	1.042.189

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Rincian Output: 6836.AEA.007 Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan bidang Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global	1 Kegiatan	143.376
	Klasifikasi Rincian Output: 6836.AEC Kerja sama	3 Kesepakatan	
	Rincian Output: 6836.AEC.003 Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Multilateral Bidang Kesehatan	3 Kesepakatan	887.362
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pengelolaan Integrasi dan Sinergi Pencapaian Sasaran Pembangunan Kesehatan			
IKK 26.2.1 Persentase provinsi yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional		15%	
	Klasifikasi Rincian Output 6837.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan		
	Rincian Output: 6837.ABG.001 Analisis Situasi Kesehatan	1 RK	3.247.286
	Klasifikasi Rincian Output: 6836.AEA Koordinasi	2 Kegiatan	

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Rincian Output: 6837.AEA.001 Advokasi dan komunikasi kebijakan kesehatan	1 Kegiatan	1.382.302
	Rincian Output: 6837.AEA.002 Integrasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan	1 Kegiatan	1.252.600
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya			
IKK 33.1.7 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		77 (nilai)	
	Klasifikasi Rincian Output 6797.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	Rincian Output: 6797.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	3 Layanan	909.276
IKK 33.2.7 Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		92,35 (Nilai)	
	Klasifikasi Rincian Output 6797.CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Rincian Output: 6797.CAN.951 Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	6 Unit	615.830
	Klasifikasi Rincian Output 6797.CCL OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		
	Rincian Output: 6797.CCL.951 Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	6 Unit	1.266.072
	Klasifikasi Rincian Output: 6797.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	Rincian Output: 6797.EBA.956 Layanan BMN	1 Layanan	373.818
	Rincian Output: 6797.EBA.957 Layanan Hukum	1 Layanan	608.050
	Rincian Output: 6797.EBA.959 Layanan Protokoler	1 Layanan	379.829
	Rincian Output: 6797.EBA.962 Layanan Umum	5 Layanan	5.766.160
	Rincian Output: 6797.EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	161.002
	Rincian Output: 6797.EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	5 Layanan	136.495

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Rincian Output: 6797.EBA.994 Layanan Perkantoran	1 Layanan	54.442.978
	Klasifikasi Rincian Output: 6797.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal		
	Rincian Output: 6797.EBB.951 Layanan Sarana Internal	11 Unit	1.625.480
	Klasifikasi Rincian Output: 6797.EBC Layanan Manajemen SDM Internal		
	Rincian Output: 6797.EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	280 Orang	2.526.909
	Klasifikasi Rincian Output: 6797.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	Rincian Output: 6797.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6 Dokumen	1.273.945
	Rincian Output: 6797.EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3 Dokumen	597.937
	Rincian Output: 6797.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	2 Dokumen	742.474
	Rincian Output: 6797.EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	1 Dokumen	451.369

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Rincian Output: 6797.EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1 Dokumen	100.522
IKK 33.3.7 Indeks Kualitas SDM Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		81 (Nilai)	
	Klasifikasi Rincian Output: 6797.EBC Layanan Manajemen SDM Internal		
	Rincian Output: 6797.EBC.954 Layanan Manajemen SDM	564 Orang	1.155.699
IKK 33.4.16 Nilai maturitas manajemen risiko Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		3,95 (Nilai)	
	Klasifikasi Rincian Output: 6797.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	Rincian Output: 6797.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3 Layanan	241.796
IKK 33.4.24 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		95%	
	Klasifikasi Rincian Output: 6797.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal		

Sasaran Program/ Sasaran Kinerja/ Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output	Target	Alokasi
	Rincian Output: 6797.EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3 Layanan	85.256

B. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Anggaran BKPK yang disetujui tahun 2025 sebesar Rp 339.979.964.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah). Anggaran ini digunakan untuk tiga Program dan tujuh kegiatan utama dengan rincian pada tabel III.2 berikut ini.

Tabel III.2 Rencana Anggaran BKPK Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan		Anggaran (ribuan)
I.	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		11.479.560.000
	1.	Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	11.479.560.000
II.	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan		255.039.507.000
	1.	Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan	86.698.544.000
	2.	Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	12.468.787.000
	3.	Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	15.362.228.000
	4.	Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	134.627.760.000
	5.	Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	5.882.188.000
III.	Program Dukungan Manajemen		73.123.731.000
	1.	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	73.123.731.000
Total Anggaran			339.979.964.000

BAB IV. PENUTUP

Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan meliputi pelaksanaan penyusunan kebijakan berbasis bukti, baik berdasarkan hasil penelitian pengembangan dan pengkajian kesehatan, juga berdasarkan data informasi lain yang relevan mencakup kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, sektor lain (Kementerian dan Lembaga) dan pemerintah daerah. dalam upaya meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan pembangunan kesehatan, diperlukan harmonisasi kebijakan Kementerian dan Lembaga, pemerintah daerah untuk mendorong mengoptimalkan dana fungsi kesehatan dalam mendukung percepatan pencapaian sasaran prioritas pembangunan kesehatan.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas atas keselarasan perencanaan dan penganggaran pada Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kebijakan dan Pembangunan Kesehatan, serta dapat memberikan informasi kepada semua pihak untuk dipergunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan di BKPK sehingga dapat menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien untuk menunjang dan berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan bidang kesehatan.

Kami tim penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang berkontribusi atas penyusunan dokumen RKT BKPK Tahun 2025 ini. Besar harapan kami dokumen ini dapat bermanfaat. Karena keterbatasan pengetahuan dan referensi, tim penyusun menyadari dokumen ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu masukan dan saran yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan atau penyempurnaan dokumen RKT BKPK tahun 2025 sangat diharapkan agar dokumen RKT ini dapat disusun menjadi lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

LAMPIRAN I

RENJA KL PROGRAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

TAHUN 2025

REKAP 2: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG : 05 - Meningkatnya kualitas tata kelola dan pembiayaan kesehatan di pusat dan daerah
3. PROGRAM : Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan
4. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2025 (RIBU)
Total		0,0

5. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Meningkatnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah		24.159.289,0
01.01	Persentase daerah yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional	15	
01.02	Persentase Kabupaten/Kota dengan capaian SPM Kesehatan minimal 90%	50	
01.03	Nilai kualitas kebijakan Kementerian Kesehatan	83	
02	Meningkatnya kecukupan, efektifitas, efisiensi, keadilan dan keberlanjutan pendanaan kesehatan		125.752.011,0
02.01	Persentase kabupaten/kota yang mengikuti bauran belanja ideal di sektor kesehatan	10	
02.02	Persentase kenaikan investasi langsung di sektor kesehatan	19	
02.03	Persentase pencapaian target global kesehatan pada tingkat nasional	50	
Total			149.911.300,0

6. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2026	2027	2028
6833	Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan	6.028.336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.028.336,0	0,0	0,0	0,0
6834	Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	6.352.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.352.050,0	0,0	0,0	0,0
6835	Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	10.400.045,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.078.157,0	0,0	0,0	0,0	11.478.202,0	0,0	0,0	0,0
6836	Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	120.032.216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120.032.216,0	0,0	0,0	0,0
6837	Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	6.020.496,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.020.496,0	0,0	0,0	0,0
Total		148.833.143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.078.157,0	0,0	0,0	0,0	149.911.300,0	0,0	0,0	0,0

TAHUN ANGGARAN 2025

[illegible]

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	702 - Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan										98.000,0
		Pusat	Pusat								98.000,0
01.ABG.019	Evaluasi Kebijakan dan Strategi Tata Kelola Mutu Fasyankes Primer (LR-11)								006 - Anggaran Kesehatan		95.609,0
	701 - Persiapan										3.858,0
		Pusat	Pusat								3.858,0
	702 - Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan										91.751,0
		Pusat	Pusat								91.751,0
01.ABG.020	Evaluasi Kebijakan dan Strategi Layanan Kesehatan Lanjutan dan Klinis (LP-1)								006 - Anggaran Kesehatan		171.624,0
	701 - Persiapan										6.842,0
		Pusat	Pusat								6.842,0
	702 - Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan										164.782,0
		Pusat	Pusat								164.782,0
01.ABG.021	Evaluasi Kebijakan dan Strategi Tata Kelola dan Mutu Fasyankes Lanjutan (LR-11)								006 - Anggaran Kesehatan		166.740,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.AEA.004	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Bidang Upaya Kesehatan								006 - Anggaran Kesehatan		1.078.563,0
	701 - Pelaksanaan Monev Implementasi Kebijakan										1.078.563,0
		Pusat	Pusat								1.078.563,0
01.AEA.005	Quality Control Rancangan Regulasi Bidang Upaya Kesehatan								006 - Anggaran Kesehatan		781.370,0
	701 - Penyiapan kajian berbasis bukti										714.010,0
		Pusat	Pusat								714.010,0
	702 - Laporan/sidang hasil uji kelayakan										67.360,0
		Pusat	Pusat								67.360,0
Total											6.028.336,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Meningkatnya kebijakan upaya kesehatan berbasis bukti				6.028.336,0				0,0	0,0	0,0
01.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan		Rekomendasi Kebijakan/ Kajian		2.819.336,0				0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.ABG.011	Kajian Pengembangan Kebijakan Baru Bidang Upaya Kesehatan (LP-1)	5	Rekomendasi Kebijakan		933.350,0	5	5	5	0,0	0,0	0,0
01.ABG.011.701	Agenda Setting	5,0	Kegiatan	71.275,0	356.375,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.011.702	Formulasi Kajian Kebijakan	5,0	Kegiatan	71.325,0	356.625,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.011.703	Dialog Kajian Kebijakan	5,0	Kegiatan	44.070,0	220.350,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.017	Evaluasi Kebijakan dan Strategi Upaya Kesehatan Masyarakat (LP-1)	1	Rekomendasi Kebijakan		171.970,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.017.701	Persiapan	0,0		Infinity	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.017.702	Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	0,0		Infinity	171.850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.018	Evaluasi Kebijakan dan Strategi Upaya Kesehatan Perseorangan (LP-1)	1	Rekomendasi Kebijakan		100.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.018.701	Persiapan	0,0		Infinity	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.018.702	Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	0,0		Infinity	98.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.019	Evaluasi Kebijakan dan Strategi Tata Kelola Mutu Fasyankes Primer (LR-11)	1	Rekomendasi Kebijakan		95.609,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.019.701	Persiapan	0,0		Infinity	3.858,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.019.702	Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	0,0		Infinity	91.751,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.020	Evaluasi Kebijakan dan Strategi Layanan Kesehatan Lanjutan dan Klinis (LP-1)	1	Rekomendasi Kebijakan		171.624,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.020.701	Persiapan	0,0		Infinity	6.842,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.020.702	Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	0,0		Infinity	164.782,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.021	Evaluasi Kebijakan dan Strategi Tata Kelola dan Mutu Fasyankes Lanjutan (LR-11)	1	Rekomendasi Kebijakan		166.740,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.ABG.021.701	Persiapan	0,0		Infinity	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.021.702	Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	0,0		Infinity	165.240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.022	Rekomendasi Kebijakan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Pemeriksaan Kesehatan Gratis (LP-1)	1	Rekomendasi Kebijakan		1.180.043,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.022.701	Persiapan	0,0		Infinity	47.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.022.702	Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	0,0		Infinity	1.132.943,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA	Koordinasi		kegiatan		3.209.000,0				0,0	0,0	0,0
01.AEA.003	Penyusunan Perencanaan Kajian Kesehatan di Bidang Upaya Kesehatan	1	kegiatan		1.349.067,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.AEA.003.701	Serial meeting Penyusunan Perencanaan Kajian Kesehatan	1,0	kegiatan	1.349.067,0	1.349.067,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.004	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Bidang Upaya Kesehatan	1	kegiatan		1.078.563,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.AEA.004.701	Pelaksanaan Monev Implementasi Kebijakan	1,0	kegiatan	1.078.563,0	1.078.563,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.005	Quality Control Rancangan Regulasi Bidang Upaya Kesehatan	6	kegiatan		781.370,0	6	6	6	0,0	0,0	0,0
01.AEA.005.701	Penyiapan kajian berbasis bukti	6,0	Kegiatan	119.001,7	714.010,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.005.702	Laporan/sidang hasil uji kelayakan	6,0	Kegiatan	11.226,7	67.360,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Total					6.028.336,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

[illegible]

[illegible]

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
2. PROGRAM : DS - Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah
4. KEGIATAN : 6834 - Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 13 - Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan
14 - Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan berbasis bukti		4.818.263,0
01.01	Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional pada wilayah II	15	
01.02	Persentase analisis kebijakan di bidang Sistem Ketahanan Kesehatan	80	
02	Meningkatnya kebijakan sistem sumber daya kesehatan berbasis bukti		1.533.787,0
02.01	Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional pada wilayah III	15	
02.02	Persentase analisis kebijakan di bidang Sistem Sumber Daya Kesehatan	80	
Total			6.352.050,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.AEA.008	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan bidang Sistem Ketahanan Kesehatan								006 - Anggaran Kesehatan		122.521,0
	701 - Pelaksanaan Monev Implementasi Kebijakan										121.396,0
		Pusat	Pusat								121.396,0
	702 - Persiapan										1.125,0
		Pusat	Pusat								1.125,0
02	<i>Meningkatnya kebijakan sistem sumber daya kesehatan berbasis bukti</i>										1.533.787,0
02.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan										1.465.500,0
02.ABG.052	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kebijakan Baru Bidang Sistem Sumber Daya Kesehatan (SDM-21)								006 - Anggaran Kesehatan		230.000,0
	701 - Persiapan										14.400,0
		Pusat	Pusat								14.400,0
	702 - Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan										215.600,0
		Pusat	Pusat								215.600,0
02.ABG.053	Rekomendasi Kebijakan dan Strategi SDM Kesehatan (SDM-21)								006 - Anggaran Kesehatan		350.000,0

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
02.AEA.010	Penyusunan Perencanaan Kajian Kesehatan Bidang Sistem Sumber Daya Kesehatan								006 - Anggaran Kesehatan		32.952,0
	701 - Penyusunan Perencanaan Kajian Kesehatan										32.952,0
		Pusat	Pusat								32.952,0
02.AEA.011	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Bidang Sistem Sumber Daya Kesehatan								006 - Anggaran Kesehatan		35.335,0
	701 - Pelaksanaan Monev Implementasi Kebijakan										35.335,0
		Pusat	Pusat								35.335,0
Total											6.352.050,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan berbasis bukti				4.818.263,0				0,0	0,0	0,0
01.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan		Rekomendasi Kebijakan/ Kajian		3.548.842,0				0,0	0,0	0,0
01.ABG.042	Kajian Evaluasi Kebijakan Sistem Ketahanan Alat Kesehatan (RF-15)	1	Rekomendasi Kebijakan		61.894,0	3	3	3	0,0	0,0	0,0
01.ABG.042.701	Analisis Implementasi Kebijakan	3,0	Kegiatan	3.044,7	9.134,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.ABG.042.702	Agenda Setting	3,0	Kegiatan	600,0	1.800,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.042.703	Formulasi Kebijakan	3,0	Kegiatan	7.394,0	22.182,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.042.704	Dialog Kebijakan	3,0	Kegiatan	9.592,7	28.778,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.043	Kajian Evaluasi Kebijakan Sistem Ketahanan Farmasi (RF-13)	1	Rekomendasi Kebijakan		69.078,0	3	3	3	0,0	0,0	0,0
01.ABG.043.701	Analisis Implementasi Kebijakan	3,0	Kegiatan	1.466,7	4.400,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.043.702	Agenda Setting	3,0	Kegiatan	21.446,0	64.338,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.043.703	Formulasi Kebijakan	3,0	Kegiatan	113,3	340,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.045	Kajian Evaluasi Kebijakan Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan (SDM-21)	3	Rekomendasi Kebijakan		1.111.854,0	3	3	3	0,0	0,0	0,0
01.ABG.045.701	Analisis Implementasi Kebijakan	3,0	Kegiatan	83.010,0	249.030,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.045.702	Agenda Setting	3,0	Kegiatan	7.920,0	23.760,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.045.703	Formulasi Kebijakan	3,0	Kegiatan	223.708,0	671.124,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.045.704	Dialog Kebijakan	3,0	Kegiatan	55.980,0	167.940,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.046	Kajian Evaluasi Kebijakan Penyediaan , Peningkatan Mutu, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan (SDM-23)	3	Rekomendasi Kebijakan		1.111.854,0	3	3	3	0,0	0,0	0,0
01.ABG.046.701	Analisis Implementasi Kebijakan	3,0	Kegiatan	83.010,0	249.030,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.046.702	Agenda Setting	3,0	Kegiatan	7.920,0	23.760,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.046.703	Formulasi Kebijakan	3,0	Kegiatan	223.708,0	671.124,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.046.704	Dialog Kebijakan	3,0	Kegiatan	55.980,0	167.940,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.047	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kebijakan Baru Bidang Sistem Ketahanan Kesehatan (HS-29)	1	Rekomendasi Kebijakan		21.197,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.047.702	Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	0,0		Infinity	21.197,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.ABG.048	Rekomendasi Kebijakan Strategi Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan & Perubahan Iklim (HS 32)	1	Rekomendasi Kebijakan		70.003,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.048.702	Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	0,0		Infinity	70.003,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.049	Evaluasi Kebijakan Strategi Penanggulangan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan (HS 35)	1	Rekomendasi Kebijakan		890.330,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.049.701	Persiapan	0,0		Infinity	3.524,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.049.702	Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	0,0		Infinity	886.806,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.050	Evaluasi Kebijakan Strategi Imunisasi, Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan (HS 29)	1	Rekomendasi Kebijakan		147.011,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.050.701	Persiapan	0,0		Infinity	4.340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.050.702	Agenda Setting	0,0		Infinity	142.671,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.051	Evaluasi Kebijakan Sistem Ketahan dan Strategi Tata Kelola Keracunan (HS-29)	1	Rekomendasi Kebijakan		65.621,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.051.701	Persiapan	0,0		Infinity	930,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.051.702	Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	0,0		Infinity	64.691,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA	Koordinasi		kegiatan		1.269.421,0				0,0	0,0	0,0
01.AEA.004	Penyusunan Perencanaan Kajian Kesehatan bidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	1	kegiatan		549.856,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.AEA.004.701	Serial Meeting Perencanaan dan Implementasi Kebijakan	1,0	Kegiatan	549.856,0	549.856,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.005	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan bidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	1	kegiatan		485.694,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.AEA.005.701	Pelaksanaan Monev Implementasi Kebijakan	1,0	Kegiatan	485.694,0	485.694,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.007	Penyusunan Perencanaan Kajian Kesehatan bidang Sistem Ketahanan Kesehatan	1	kegiatan		111.350,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.007.701	Penyusunan Perencanaan Kajian Kesehatan	0,0		Infinity	106.622,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.007.702	Persiapan	0,0		Infinity	4.728,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.008	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan bidang Sistem Ketahanan Kesehatan	1	kegiatan		122.521,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.008.701	Pelaksanaan Monev Implementasi Kebijakan	0,0		Infinity	121.396,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.008.702	Persiapan	0,0		Infinity	1.125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Meningkatnya kebijakan sistem sumber daya kesehatan berbasis bukti				1.533.787,0				0,0	0,0	0,0
02.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan		Rekomendasi Kebijakan/ Kajian		1.465.500,0				0,0	0,0	0,0
02.ABG.052	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kebijakan Baru Bidang Sistem Sumber Daya Kesehatan (SDM-21)	1	Rekomendasi Kebijakan		230.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
02.ABG.052.701	Persiapan	0,0		Infinity	14.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.ABG.052.702	Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	0,0		Infinity	215.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.ABG.053	Rekomendasi Kebijakan dan Strategi SDM Kesehatan (SDM-21)	1	Rekomendasi Kebijakan		350.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
02.ABG.053.701	Persiapan	0,0		Infinity	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.ABG.053.702	Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	0,0		Infinity	346.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.ABG.054	Rekomendasi Kebijakan dan Strategi Sistem Informasi Kesehatan (TK-31)	1	Rekomendasi Kebijakan		634.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
02.ABG.054.701	Persiapan	0,0		Infinity	7.575,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
02.ABG.054.702	Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	0,0		Infinity	626.425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.ABG.055	Rekomendasi Kebijakan dan Strategi Integrasi Sumber Daya Kesehatan (SDM-21)	1	Rekomendasi Kebijakan		251.500,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
02.ABG.055.701	Persiapan	0,0		Infinity	14.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.ABG.055.702	Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	0,0		Infinity	237.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.AEA	Koordinasi		kegiatan		68.287,0				0,0	0,0	0,0
02.AEA.010	Penyusunan Perencanaan Kajian Kesehatan Bidang Sistem Sumber Daya Kesehatan	1	kegiatan		32.952,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
02.AEA.010.701	Penyusunan Perencanaan Kajian Kesehatan	0,0		Infinity	32.952,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.AEA.011	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Bidang Sistem Sumber Daya Kesehatan	1	kegiatan		35.335,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
02.AEA.011.701	Pelaksanaan Monev Implementasi Kebijakan	0,0		Infinity	35.335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total					6.352.050,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
2. PROGRAM : DS - Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah
02 - Meningkatnya kecukupan, efektifitas, efisiensi, keadilan dan keberlanjutan pendanaan kesehatan
4. KEGIATAN : 6835 - Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 14 - Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan
15 - Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Meningkatnya kebijakan strategi dan tata kelola kesehatan global berbasis bukti		4.022.813,0
01.01	Persentase capaian SPM Kesehatan kabupaten/kota yang telah divalidasi	10	
02	Meningkatnya kerja sama dan dukungan stakeholder dalam program kesehatan		403.688,0
02.01	Pemenuhan pembiayaan untuk mendukung terpenuhinya SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang kesehatan	50	
03	Tersedianya bahan kebijakan bidang sistem sumber daya kesehatan		7.051.701,0
03.01	Persentase kenaikan investasi langsung kesehatan di bidang farmasi	12	
03.02	Persentase kenaikan investasi langsung kesehatan di bidang alat kesehatan	16	
03.03	Persentase kenaikan investasi langsung kesehatan di bidang fasilitas pelayanan kesehatan	25	
Total			11.478.202,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								1.078.157,0
	704 - Dialog Kebijakan										81.400,0
		Pusat	Pusat								81.400,0
03.ABG.019	Rekomendasi Kebijakan Kenaikan Investasi Kesehatan di bidang Farmasi (PK-20)								006 - Anggaran Kesehatan		107.140,0
	701 - Persiapan										2.040,0
		Pusat	Pusat								2.040,0
	702 - Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan										105.100,0
		Pusat	Pusat								105.100,0
03.ABG.020	Rekomendasi Kebijakan Kenaikan Investasi Kesehatan di bidang Alkes (PK-20)								006 - Anggaran Kesehatan		141.200,0
	701 - Persiapan										1.800,0
		Pusat	Pusat								1.800,0
	702 - Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan										139.400,0
		Pusat	Pusat								139.400,0
03.ABG.021	Rekomendasi Kebijakan Kenaikan Investasi Kesehatan di bidang Fasyankes (PK-20)								006 - Anggaran Kesehatan		16.494,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	701 - Persiapan										1.800,0
		Pusat	Pusat								1.800,0
	702 - Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan										14.694,0
		Pusat	Pusat								14.694,0
Total											11.478.202,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Meningkatnya kebijakan strategi dan tata kelola kesehatan global berbasis bukti				2.128.813,0				0,0	0,0	0,0
01.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan		Rekomendasi Kebijakan/ Kajian		2.128.813,0				0,0	0,0	0,0
01.ABG.018	Rekomendasi Kebijakan National Health Account (PK-17)	1	Rekomendasi Kebijakan		2.128.813,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.ABG.018.701	Analisis Implementasi Kebijakan	1,0	Dokumen	200.000,0	200.000,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.018.703	Formulasi Kebijakan	1,0	Dokumen	1.839.313,0	1.839.313,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.018.704	Dialog Kebijakan	1,0	Dokumen	89.500,0	89.500,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02	Meningkatnya kerja sama dan dukungan stakeholder dalam program kesehatan				403.688,0				0,0	0,0	0,0
02.AEA	Koordinasi		kegiatan		403.688,0				0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
02.AEA.005	Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Pengalokasian dan Implementasi Pembiayaan Kesehatan	1	kegiatan		403.688,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
02.AEA.005.701	Persiapan	0,0		Infinity	12.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.AEA.005.702	Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Pengalokasian dan Implementasi Pembiayaan Kesehatan	0,0		Infinity	391.538,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03	Tersedianya bahan kebijakan bidang sistem sumber daya kesehatan				8.945.701,0				0,0	0,0	0,0
03.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan		Rekomendasi Kebijakan/ Kajian		8.945.701,0				0,0	0,0	0,0
03.ABG.012	Rekomendasi Kebijakan Penataan Ulang Manfaat dalam Program JKN (PK-18)	1	Rekomendasi Kebijakan		800.150,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
03.ABG.012.703	Formulasi Kebijakan	1,0	Dokumen	759.450,0	759.450,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
03.ABG.012.704	Dialog Kebijakan	1,0	Dokumen	40.700,0	40.700,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
03.ABG.014	Rekomendasi Kebijakan Health Technology Assesment (PK-19)	6	Rekomendasi Kebijakan		4.486.458,0	6	6	6	0,0	0,0	0,0
03.ABG.014.702	Analisis Implementasi Kebijakan	1,0	Dokumen	1.200.000,0	1.200.000,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
03.ABG.014.703	Formulasi Kebijakan	1,0	Dokumen	2.691.728,0	2.691.728,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
03.ABG.014.704	Dialog Kebijakan	1,0	Dokumen	594.730,0	594.730,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
03.ABG.015	Rekomendasi Kebijakan INA Grouper dalam Program JKN (PK-18)	1	Rekomendasi Kebijakan		1.093.850,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
03.ABG.015.703	Formulasi Kebijakan	1,0	Dokumen	1.053.150,0	1.053.150,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
03.ABG.015.704	Dialog Kebijakan	1,0	Dokumen	40.700,0	40.700,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
03.ABG.016	Rekomendasi Kebijakan Annual Review dan Evaluasi Tarif INA CBG dalam Program JKN (PK-18)	2	Rekomendasi Kebijakan		2.300.409,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
03.ABG.016.701	Analisis Implementasi Kebijakan	1,0	Dokumen	200.000,0	200.000,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
03.ABG.016.703	Formulasi Kebijakan	1,0	Dokumen	940.852,0	940.852,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
03.ABG.016.703	Formulasi Kebijakan	1,0	Dokumen	1.078.157,0	1.078.157,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
03.ABG.016.704	Dialog Kebijakan	1,0	Dokumen	81.400,0	81.400,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
03.ABG.019	Rekomendasi Kebijakan Kenaikan Investasi Kesehatan di bidang Farmasi (PK-20)	1	Rekomendasi Kebijakan		107.140,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
03.ABG.019.701	Persiapan	0,0		Infinity	2.040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.ABG.019.702	Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	0,0		Infinity	105.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.ABG.020	Rekomendasi Kebijakan Kenaikan Investasi Kesehatan di bidang Alkes (PK-20)	1	Rekomendasi Kebijakan		141.200,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
03.ABG.020.701	Persiapan	0,0		Infinity	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.ABG.020.702	Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	0,0		Infinity	139.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.ABG.021	Rekomendasi Kebijakan Kenaikan Investasi Kesehatan di bidang Fasyankes (PK-20)	1	Rekomendasi Kebijakan		16.494,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
03.ABG.021.701	Persiapan	0,0		Infinity	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03.ABG.021.702	Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	0,0		Infinity	14.694,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total					11.478.202,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2025										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
03.ABG.015.703	Formulasi Kebijakan	Utama	1.053.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.053.150,0
03.ABG.015.704	Dialog Kebijakan	Utama	40.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40.700,0
03.ABG.016	Rekomendasi Kebijakan Annual Review dan Evaluasi Tarif INA CBG dalam Program JKN (PK-18)		1.222.252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.078.157,0	0,0	0,0	0,0	2.300.409,0
03.ABG.016.701	Analisis Implementasi Kebijakan	Utama	200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200.000,0
03.ABG.016.703	Formulasi Kebijakan	Utama	940.852,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.078.157,0	0,0	0,0	0,0	2.019.009,0
03.ABG.016.704	Dialog Kebijakan	Utama	81.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81.400,0
03.ABG.019	Rekomendasi Kebijakan Kenaikan Investasi Kesehatan di bidang Farmasi (PK-20)		107.140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	107.140,0
03.ABG.019.701	Persiapan		2.040,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.040,0
03.ABG.019.702	Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan		105.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105.100,0
03.ABG.020	Rekomendasi Kebijakan Kenaikan Investasi Kesehatan di bidang Alkes (PK-20)		141.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141.200,0
03.ABG.020.701	Persiapan		1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0
03.ABG.020.702	Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan		139.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139.400,0
03.ABG.021	Rekomendasi Kebijakan Kenaikan Investasi Kesehatan di bidang Fasyankes (PK-20)		16.494,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.494,0
03.ABG.021.701	Persiapan		1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0
03.ABG.021.702	Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan		14.694,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.694,0
Total			10.400.045,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.078.157,0	0,0	0,0	0,0	11.478.202,0

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
2. PROGRAM : DS - Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah
02 - Meningkatnya kecukupan, efektifitas, efisiensi, keadilan dan keberlanjutan pendanaan kesehatan
4. KEGIATAN : 6836 - Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 15 - Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Meningkatnya kebijakan strategi dan tata kelola kesehatan global berbasis bukti		1.735.594,0
01.01	Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan yang mendukung indikator kesehatan nasional pada wilayah IV	15	
01.02	Persentase analisis kebijakan di bidang Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global	80	
02	Meningkatnya kerja sama dan dukungan stakeholder dalam program kesehatan		118.296.622,0
02.01	Jumlah peran strategis Indonesia pada OI/pertemuan internasional bidang kesehatan	17	
02.02	Persentase target kesehatan nasional selaras dengan target global	80	
Total			120.032.216,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Meningkatnya kebijakan strategi dan tata kelola kesehatan global berbasis bukti</i>										693.405,0
01.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan										283.328,0
01.ABG.038	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kebijakan baru bidang Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global (HS-32)								006 - Anggaran Kesehatan		158.081,0
	701 - Persiapan										81,0
		Pusat	Pusat								81,0
	702 - Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan										158.000,0
		Pusat	Pusat								158.000,0
01.ABG.039	Evaluasi Kebijakan Mitra Pembangunan (RF-14)								006 - Anggaran Kesehatan		156,0
	701 - Persiapan										10,0
		Pusat	Pusat								10,0
	702 - Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan										146,0
		Pusat	Pusat								146,0

[illegible]

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	702 - Koordinasi Interkementerian										143.327,0
		Pusat	Pusat								143.327,0
	703 - Monitoring Evaluasi Dokumen Kerja Sama Pinjaman Hibah Luar Negeri										242.970,0
		Pusat	Pusat								242.970,0
02.AEC.011	Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Regional Bidang Kesehatan (RF 14)								006 - Anggaran Kesehatan		2.886.019,0
	701 - Penyusunan Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Regional Bidang Kesehatan										2.502.739,0
		Pusat	Pusat								2.502.739,0
	702 - Koordinasi Interkementerian										194.540,0
		Pusat	Pusat								194.540,0
	703 - Monitoring Evaluasi Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Regional Bidang Kesehatan										188.740,0
		Pusat	Pusat								188.740,0
02.AEC.012	Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Bilateral Bidang Kesehatan (RF 14)								006 - Anggaran Kesehatan		1.749.753,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	701 - Penyusunan Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Bilateral Bidang Kesehatan										379.581,0
		Pusat	Pusat								379.581,0
	702 - Koordinasi Interkementerian										324.694,0
		Pusat	Pusat								324.694,0
	703 - Monitoring Evaluasi Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Bilateral Bidang Kesehatan										1.045.478,0
		Pusat	Pusat								1.045.478,0
02.AEC.013	Kontribusi Indonesia Pada Organisasi Internasional Non Pemerintah (HS 32)								006 - Anggaran Kesehatan		98.743.000,0
	701 - Pelaksanaan Komitmen kontribusi Indonesia Pada CEPI										16.428.000,0
		Pusat	Pusat								16.428.000,0
	702 - Pelaksanaan Komitmen Kontribusi Indonesia Pada Global Fund										82.315.000,0
		Pusat	Pusat								82.315.000,0
02.AEC.014	Operasionalisasi ACPHEED (HS 29)								006 - Anggaran Kesehatan		2.362.197,0

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								6.726.225,0
Total											120.032.216,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Meningkatnya kebijakan strategi dan tata kelola kesehatan global berbasis bukti				693.405,0				0,0	0,0	0,0
01.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan		Rekomendasi Kebijakan/ Kajian		283.328,0				0,0	0,0	0,0
01.ABG.038	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kebijakan baru bidang Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global (HS-32)	1	Rekomendasi Kebijakan		158.081,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.038.701	Persiapan	0,0		Infinity	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.038.702	Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	0,0		Infinity	158.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.039	Evaluasi Kebijakan Mitra Pembangunan (RF-14)	1	Rekomendasi Kebijakan		156,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.039.701	Persiapan	0,0		Infinity	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.039.702	Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	0,0		Infinity	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.040	Evaluasi Kebijakan Desentralisasi Kesehatan (PK-20)	1	Rekomendasi Kebijakan		21.072,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.040.701	Persiapan	0,0		Infinity	2.268,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.040.702	Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	0,0		Infinity	18.804,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.ABG.041	Evaluasi Kebijakan Transformasi Kesehatan (HS-29)	1	Rekomendasi Kebijakan		104.019,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.041.701	Persiapan	0,0		Infinity	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.041.702	Pelaksanaan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan	0,0		Infinity	104.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA	Koordinasi		kegiatan		410.077,0				0,0	0,0	0,0
01.AEA.003	Penyusunan Perencanaan Kajian Kesehatan bidang Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	1	kegiatan		289.938,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.AEA.003.701	Serial Meeting Penyusunan Perencanaan Kajian Kesehatan	1,0	Kegiatan	289.938,0	289.938,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.006	Penyusunan Perencanaan Kajian Kesehatan bidang Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global	1	kegiatan		120.139,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.006.701	Penyusunan Perencanaan Kajian Kesehatan	0,0		Infinity	120.089,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.006.702	Persiapan	0,0		Infinity	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02	Meningkatnya kerja sama dan dukungan stakeholder dalam program kesehatan				119.338.811,0				0,0	0,0	0,0
02.AEA	Koordinasi		kegiatan		1.194.460,0				0,0	0,0	0,0
02.AEA.004	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan bidang Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	1	kegiatan		1.042.189,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
02.AEA.004.701	Pelaksanaan Monev Implementasi Kebijakan	1,0	Kegiatan	1.042.189,0	1.042.189,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.AEA.007	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan bidang Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global	1	kegiatan		152.271,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
02.AEA.007.701	Pelaksanaan Monev Implementasi Kebijakan	0,0		Infinity	152.221,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.AEA.007.702	Persiapan	0,0		Infinity	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.AEC	Kerja sama		Kesepakatan/ Dokumen/ Kegiatan		107.343.981,0				0,0	0,0	0,0
02.AEC.003	Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Multilateral Bidang Kesehatan (HS 32)	3	Kesepakatan		689.962,0	3	3	3	0,0	0,0	0,0
02.AEC.003.701	Penyusunan Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Multilateral Bidang Kesehatan	1,0	Kegiatan	335.120,0	335.120,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.AEC.003.702	Koordinasi Interkementerian	1,0	Kegiatan	245.000,0	245.000,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.AEC.003.703	Monitoring Evaluasi Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Multilateral Bidang Kesehatan	1,0	Kegiatan	109.842,0	109.842,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.AEC.005	Dokumen Pinjaman Hibah Luar Negeri (HS 32)	3	Kesepakatan		597.601,0	3	3	3	0,0	0,0	0,0
02.AEC.005.701	Penyusunan Dokumen Kerja Sama Pinjaman Hibah Luar Negeri	1,0	Kegiatan	211.304,0	211.304,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.AEC.005.702	Koordinasi Interkementerian	1,0	Kegiatan	143.327,0	143.327,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.AEC.005.703	Monitoring Evaluasi Dokumen Kerja Sama Pinjaman Hibah Luar Negeri	1,0	Kegiatan	242.970,0	242.970,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.AEC.011	Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Regional Bidang Kesehatan (RF 14)	14	Kesepakatan		2.886.019,0	3	3	3	0,0	0,0	0,0
02.AEC.011.701	Penyusunan Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Regional Bidang Kesehatan	1,0	Kegiatan	2.502.739,0	2.502.739,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.AEC.011.702	Koordinasi Interkementerian	1,0	Kegiatan	194.540,0	194.540,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.AEC.011.703	Monitoring Evaluasi Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Regional Bidang Kesehatan	1,0	Kegiatan	188.740,0	188.740,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
02.AEC.012	Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Bilateral Bidang Kesehatan (RF 14)	15	Kesepakatan		1.749.753,0	3	3	3	0,0	0,0	0,0
02.AEC.012.701	Penyusunan Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Bilateral Bidang Kesehatan	1,0	Kegiatan	379.581,0	379.581,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.AEC.012.702	Koordinasi Interkementerian	1,0	Kegiatan	324.694,0	324.694,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.AEC.012.703	Monitoring Evaluasi Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Bilateral Bidang Kesehatan	1,0	Kegiatan	1.045.478,0	1.045.478,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.AEC.013	Kontribusi Indonesia Pada Organisasi Internasional Non Pemerintah (HS 32)	2	Dokumen		98.743.000,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
02.AEC.013.701	Pelaksanaan Komitmen kontribusi Indonesia Pada CEPI	1,0	Kegiatan	16.428.000,0	16.428.000,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.AEC.013.702	Pelaksanaan Komitmen Kontribusi Indonesia Pada Global Fund	1,0	Kegiatan	82.315.000,0	82.315.000,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.AEC.014	Operasionalisasi ACPHEED (HS 29)	1	Dokumen		2.362.197,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
02.AEC.014.701	Operasionalisasi ACPHEED	1,0	Kegiatan	2.362.197,0	2.362.197,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.AEC.015	Dokumen Mitra Pembangunan Kesehatan (HS-32)	16	Kesepakatan		315.449,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
02.AEC.015.701	Persiapan	0,0		Infinity	10.530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.AEC.015.702	Penyusunan Dokumen Kerja Sama Mitra Pembangunan Kesehatan	0,0		Infinity	304.919,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02.AEG	Konferensi dan Event		Kegiatan/ Paket Kegiatan		10.800.370,0				0,0	0,0	0,0
02.AEG.001	Tuan Rumah Penyelenggaraan Pertemuan Internasional (HS 32)	2	Kegiatan		4.074.145,0	2	2	2	0,0	0,0	0,0
02.AEG.001.702	Pelaksanaan Pertemuan Internasional	1,0	Kegiatan	4.074.145,0	4.074.145,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
02.AEG.003	Partisipasi aktif dalam Sidang Internasional Bilateral, Regional dan Multilateral Bidang Kesehatan (HS 32)	20	Kegiatan		6.726.225,0	20	20	20	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
02.AEG.003.701	Pelaksanaan Sidang/Pertemuan Internasional	20,0	Kegiatan	336.311,3	6.726.225,0	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Total					120.032.216,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TAHUN ANGGARAN 2025

6. SASARAN KEGIATAN

[illegible]

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								409.768,0
01.AEA.002	Integrasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan								006 - Anggaran Kesehatan		1.252.600,0
	701 - Pendampingan Penyusunan Naskah Akademik/ Naskah Kajian										170.302,0
		Pusat	Pusat								170.302,0
	702 - Pendampingan Penyusunan Arsitektur Kebijakan dan Pedoman NSPK										176.200,0
		Pusat	Pusat								176.200,0
	703 - Pendampingan Kebijakan atau Regulasi Kemenkes Berdasarkan Kajian										229.590,0
		Pusat	Pusat								229.590,0
	704 - Penyusunan Peraturan Pelaksana UU Kesehatan										676.508,0
		Pusat	Pusat								676.508,0
Total											6.020.496,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Meningkatnya pengelolaan integrasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan kesehatan				6.020.496,0				0,0	0,0	0,0
01.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan		Rekomendasi Kebijakan/ Kajian		3.247.286,0				0,0	0,0	0,0
01.ABG.001	Analisis Situasi Kesehatan	2	Rekomendasi Kebijakan		3.247.286,0	1	0	0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.001.701	Manajemen Pelaksanaan Pembinaan Wilayah	1,0	Laporan	1.943.834,0	1.943.834,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.001.702	Analisis Isu Strategis Kesehatan	1,0	Laporan	491.054,0	491.054,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.001.703	Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan	1,0	Laporan	812.398,0	812.398,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA	Koordinasi		kegiatan		2.773.210,0				0,0	0,0	0,0
01.AEA.001	Advokasi dan Komunikasi Kebijakan Kesehatan	1	kegiatan		1.520.610,0	1	1	0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.001.701	Komunikasi dan Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan	1,0	Laporan	543.722,0	543.722,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.001.702	Advokasi dan Utilisasi Hasil Analisis Kebijakan	1,0	Laporan	567.120,0	567.120,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.001.704	Strategi Komunikasi Kebijakan	1,0	Laporan	409.768,0	409.768,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.002	Integrasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan	1	kegiatan		1.252.600,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.AEA.002.701	Pendampingan Penyusunan Naskah Akademik/ Naskah Kajian	1,0	Laporan	170.302,0	170.302,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.002.702	Pendampingan Penyusunan Arsitektur Kebijakan dan Pedoman NSPK	1,0	Laporan	176.200,0	176.200,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.002.703	Pendampingan Kebijakan atau Regulasi Kemenkes Berdasarkan Kajian	1,0	Laporan	229.590,0	229.590,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.002.704	Penyusunan Peraturan Pelaksana UU Kesehatan	1,0	Laporan	676.508,0	676.508,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0

[illegible]

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
2. PROGRAM : DG - Program Pelayanan Kesehatan dan JKN
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Terpenuhinya Pembiayaan Kesehatan dalam Mencapai UHC
4. KEGIATAN : 6804 - Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 09 - Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Terlaksananya penyiapan implementasi pembiayaan dan jaminan kesehatan		11.479.560,0
01.01	Persentase asuransi kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan	100	
Total			11.479.560,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Terlaksananya penyiapan implementasi pembiayaan dan jaminan kesehatan</i>										11.479.560,0
01.AEA	Koordinasi										3.328.056,0
01.AEA.001	Audit Koding di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (PK-33)								006 - Anggaran Kesehatan		1.044.220,0

[illegible]

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan										240.000,0
01.FAE.001	Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan								006 - Anggaran Kesehatan		240.000,0
	701 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi										240.000,0
		Pusat	Pusat								240.000,0
01.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah										1.928.980,0
01.FBA.001	Penguatan Pelaksanaan Health Account (PHA/DHA) di Daerah (PK-17)								006 - Anggaran Kesehatan		1.928.980,0
	701 - Pendampingan Pelaksanaan Perhitungan PHA/DHA										1.928.980,0
		Pusat	Pusat								1.928.980,0
Total											11.479.560,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Terlaksananya penyiapan implementasi pembiayaan dan jaminan kesehatan				11.479.560,0				0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.AEA	Koordinasi		kegiatan		3.328.056,0				0,0	0,0	0,0
01.AEA.001	Audit Koding di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (PK-33)	1	kegiatan		1.044.220,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.AEA.001.701	Pelaksanaan Audit Koding	1,0	Laporan	258.560,0	258.560,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.001.702	Pembahasan dan Analisis Audit Koding	1,0	Laporan	785.660,0	785.660,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.002	Fasilitasi Penyusunan Regulasi dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (PK-20)	1	kegiatan		437.450,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.AEA.002.701	Pembahasan Teknis Penyusunan Regulasi	1,0	kegiatan	437.450,0	437.450,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.003	Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Pengalokasian dan Implementasi Pembiayaan Kesehatan (PK-20)	1	kegiatan		1.296.546,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.AEA.003.701	Pembahasan Teknis Penyusunan Kebijakan	1,0	Laporan	574.206,0	574.206,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.003.703	Fasilitasi Koordinasi Pertemuan LS/LP	1,0	Laporan	722.340,0	722.340,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.004	Fasilitasi Dewan Pertimbangan Klinis	1	kegiatan		549.840,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.AEA.004.701	Pembahasan Teknis Dewan Pertimbangan Klinis	1,0	Laporan	394.320,0	394.320,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AEA.004.702	Konfirmasi Lapangan	1,0	Laporan	155.520,0	155.520,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi		orang		1.777.514,0				0,0	0,0	0,0
01.AEF.001	Orang yang Mendapatkan Advokasi Pembiayaan Kesehatan untuk Kegiatan Promotif dan Preventif	3000	orang		1.777.514,0	6000	6000	6000	0,0	0,0	0,0
01.AEF.001.701	Pelaksanaan Advokasi Pembiayaan Kesehatan	3.000,0	orang	592,5	1.777.514,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	0,0	0,0	0,0

[illegible]

[illegible]

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2025

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
2. PROGRAM : WA - Program Dukungan Manajemen
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan
4. KEGIATAN : 6797 - Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : 08 - Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2025	ALOKASI 2025 (RIBU)
01	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya		63.517.960,0
01.01	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	77	
01.02	Nilai Kinerja Anggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	92,35	
01.03	Indeks Kualitas SDM Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	81	
01.04	Nilai Maturitas Manajemen Risiko Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	3.95	
01.05	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	95	
Total			63.517.960,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								41.659,0
	704 - Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi										271.010,0
		Pusat	Pusat								271.010,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal										56.202.083,0
01.EBA.956	Layanan BMN								006 - Anggaran Kesehatan		33.669,0
	715 - Pengelolaan BMN										33.669,0
		Pusat	Pusat								33.669,0
01.EBA.957	Layanan Hukum								006 - Anggaran Kesehatan		73.970,0
	701 - Pelaksanaan Layanan Penyusunan Regulasi										72.000,0
		Pusat	Pusat								72.000,0
	703 - Bimtek Hukum										170,0
		Pusat	Pusat								170,0
	704 - Layanan Kekayaan Intelektual										1.800,0
		Pusat	Pusat								1.800,0
01.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi								006 - Anggaran Kesehatan		42.606,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	713 - Layanan Pimpinan										569.142,0
		Pusat	Pusat								569.142,0
	714 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa										18.707,0
		Pusat	Pusat								18.707,0
	715 - Layanan Perpustakaan										236.768,0
		Pusat	Pusat								236.768,0
	716 - Pengelolaan Layanan Kesehatan										35.720,0
		Pusat	Pusat								35.720,0
	717 - Layanan Umum Unit Kerja										289.765,0
		Pusat	Pusat								289.765,0
01.EBA.963	Layanan Data dan Informasi								006 - Anggaran Kesehatan		11.579,0
	701 - Pengorganisasian dan Pengelolaan Data										11.579,0
		Pusat	Pusat								11.579,0
01.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum								006 - Anggaran Kesehatan		351,0
	701 - Advokasi dan Pendampingan Hukum										351,0
		Pusat	Pusat								351,0

[illegible]

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi								006 - Anggaran Kesehatan		52.305,0
	721 - Pelaksanaan Layanan Pemantauan dan Evaluasi										52.305,0
		Pusat	Pusat								52.305,0
01.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan								006 - Anggaran Kesehatan		79.698,0
	721 - Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan										49.820,0
		Pusat	Pusat								49.820,0
	722 - Penyusunan Dokumen Tindak Lanjut LHP dan Dokumen TPTGR										5.304,0
		Pusat	Pusat								5.304,0
	723 - Monitoring dan Evaluasi Keuangan										3.083,0
		Pusat	Pusat								3.083,0
	724 - Pengelolaan Perbendaharaan										21.491,0
		Pusat	Pusat								21.491,0
01.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja								006 - Anggaran Kesehatan		28.778,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	721 - Pengelolaan RB dan WBK/WBBM										15.637,0
		Pusat	Pusat								15.637,0
	722 - Penyelenggaraan SPIP										13.141,0
		Pusat	Pusat								13.141,0
01.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan								006 - Anggaran Kesehatan		10.828,0
	721 - Penatausahaan Kearsipan										10.828,0
		Pusat	Pusat								10.828,0
Total											63.517.960,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya				63.517.960,0				0,0	0,0	0,0
01.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		Unit		108.010,0				0,0	0,0	0,0
01.CAN.951	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	4	Unit		108.010,0	6	6	6	0,0	0,0	0,0
01.CAN.951.715	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	3,0	Unit	36.003,3	108.010,0	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		Unit		442.918,0				0,0	0,0	0,0
01.CCL.951	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	4	Unit		442.918,0	6	6	6	0,0	0,0	0,0
01.CCL.951.701	Pemeliharaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,0	Unit	119.070,0	119.070,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.CCL.951.702	Pengadaan Sistem Keamanan Jaringan	2,0	Unit	5.589,5	11.179,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
01.CCL.951.703	Pemeliharaan Prasarana TIK	3,0	Unit	13.886,3	41.659,0	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
01.CCL.951.704	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi	0,0	Laporan	Infinity	271.010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/ Laporan/ Dokumen/ Rekomendasi/ Unit		56.202.083,0				0,0	0,0	0,0
01.EBA.956	Layanan BMN	1	Layanan		33.669,0	5	5	5	0,0	0,0	0,0
01.EBA.956.715	Pengelolaan BMN	5,0	Laporan	6.733,8	33.669,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.957	Layanan Hukum	1	Layanan		73.970,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBA.957.701	Pelaksanaan Layanan Penyusunan Regulasi	1,0	Layanan	72.000,0	72.000,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.957.703	Bimtek Hukum	1,0	Laporan	170,0	170,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.957.704	Layanan Kekayaan Intelektual	1,0	Layanan	1.800,0	1.800,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan		42.606,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBA.958.722	Pengelolaan Hubungan Masyarakat	1,0	Laporan	42.606,0	42.606,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.959	Layanan Protokoler	1	Layanan		252.191,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBA.959.701	Layanan Protokoler	1,0	Laporan	252.191,0	252.191,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan		17.252,0	3	3	3	0,0	0,0	0,0
01.EBA.960.705	Penataan Organisasi	1,0	Laporan	7.368,0	7.368,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.960.706	Penataan Tata Laksana	1,0	Laporan	9.884,0	9.884,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.962	Layanan Umum	5	Layanan		1.327.487,0	4	4	4	0,0	0,0	0,0
01.EBA.962.711	Pengelolaan Tata Persuratan	1,0	Laporan	24.171,0	24.171,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.962.712	Pengelolaan Kerumahtanggaan	1,0	Laporan	153.214,0	153.214,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.962.713	Layanan Pimpinan	1,0	Laporan	569.142,0	569.142,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.962.714	Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	0,0	Laporan	Infinity	18.707,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.962.715	Layanan Perpustakaan	1,0	Laporan	236.768,0	236.768,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.962.716	Pengelolaan Layanan Kesehatan	0,0	Laporan	Infinity	35.720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.962.717	Layanan Umum Unit Kerja	0,0	Laporan	Infinity	289.765,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1	Layanan		11.579,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBA.963.701	Pengorganisasian dan Pengelolaan Data	1,0	Laporan	11.579,0	11.579,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	1	Layanan		351,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBA.969.701	Advokasi dan Pendampingan Hukum	1,0	Laporan	351,0	351,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan		54.442.978,0	5	5	5	0,0	0,0	0,0
01.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	5,0	Layanan	10.888.595,6	54.442.978,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
01.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Unit/ m2/ Paket		6.218.283,0				0,0	0,0	0,0
01.EBB.951	Layanan Sarana Internal	29	Unit		975.283,0	9	10	0	0,0	0,0	0,0
01.EBB.951.722	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1,0	Unit	975.283,0	975.283,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1	Unit		5.243.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.EBB.971.701	Konstruksi Fisik	0,0		Infinity	4.320.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBB.971.702	Perencanaan Konstruksi	0,0		Infinity	416.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBB.971.703	Pengawasan Konstruksi	0,0		Infinity	298.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBB.971.704	Pengelolaan Kegiatan	0,0		Infinity	209.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		Orang/ Layanan/ Rekomendasi		290.703,0				0,0	0,0	0,0
01.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	397	Orang		100.340,0	583	583	583	0,0	0,0	0,0
01.EBC.954.723	Pengelolaan Manajemen SDM Aparatur	564,0	Orang	177,9	100.340,0	650,0	650,0	650,0	0,0	0,0	0,0
01.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	150	Orang		190.363,0	583	583	583	0,0	0,0	0,0
01.EBC.996.701	Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional	583,0	Orang	326,5	190.363,0	583,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		Dokumen/ Layanan/ Laporan/ Rekomendasi		255.963,0				0,0	0,0	0,0
01.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6	Dokumen		84.354,0	6	6	6	0,0	0,0	0,0
01.EBD.952.721	Penyusunan Perencanaan	4,0	Dokumen	9.943,3	39.773,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.952.722	Penyusunan Anggaran	2,0	Dokumen	22.290,5	44.581,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3	Dokumen		52.305,0	4	4	4	0,0	0,0	0,0
01.EBD.953.721	Pelaksanaan Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4,0	Dokumen	13.076,3	52.305,0	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	2	Dokumen		79.698,0	5	5	5	0,0	0,0	0,0
01.EBD.955.721	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan	1,0	Dokumen	49.820,0	49.820,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.955.722	Penyusunanan Dokumen Tindak Lanjut LHP dan Dokumen TPTGR	1,0	Dokumen	5.304,0	5.304,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.955.723	Monitoring dan Evaluasi Keuangan	1,0	Dokumen	3.083,0	3.083,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2025			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2025 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028
01.EBD.955.724	Pengelolaan Perbendaharaan	1,0	Dokumen	21.491,0	21.491,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	2	Dokumen		28.778,0	1	1	1	0,0	0,0	0,0
01.EBD.961.721	Pengelolaan RB dan WBK/WBBM	1,0	Dokumen	15.637,0	15.637,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.961.722	Penyelenggaraan SPIP	0,0	Dokumen	Infinity	13.141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	Dokumen		10.828,0	5	5	5	0,0	0,0	0,0
01.EBD.974.721	Penatausahaan Kearsipan	1,0	Dokumen	10.828,0	10.828,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Total					63.517.960,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

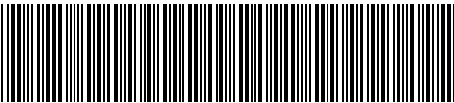
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

LAMPIRAN II
DIPA BKPK TAHUN 2025



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 024.11.1.416151/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 11
Tanggal : 13 Oktober 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
- 2. Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
- 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- 4. Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
- Sebesar : Rp. 339.979.964.000 (TIGA RATUS TIGA PULUH SEMBILAN MILIAR SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 07 KESEHATAN
- 07.90 KESEHATAN LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	339.979.964.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN JAKARTA VII (182) Rp. 339.979.964.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

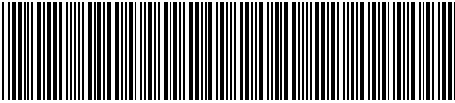
ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025

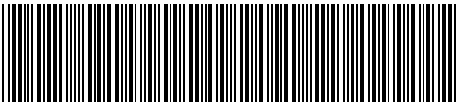


DS:4346-1409-0260-1982

Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Rp.	11.479.560.000
DG.6804	Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Rp.	11.479.560.000
DS	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Rp.	255.376.673.000
DS.6833	Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan	Rp.	86.698.544.000
DS.6834	Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	Rp.	12.738.787.000
DS.6835	Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	Rp.	15.523.394.000
DS.6836	Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	Rp.	134.533.760.000
DS.6837	Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	Rp.	5.882.188.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	73.123.731.000
WA.6797	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Rp.	73.123.731.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025
I A. INFORMASI KINERJA



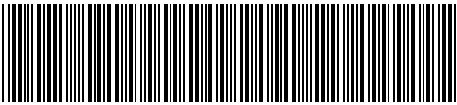
DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : I A. 1

Program	:	024.11.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN			11.479.560.000
Kegiatan	:	6804	Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan			11.479.560.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output	1	:	6804.AEA Koordinasi	4,00	kegiatan	3.328.056.000
Rincian Output	:	01	AEA.001 Audit Koding di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (PK-33)	1.00	kegiatan	1.044.220.000
		02	AEA.002 Fasilitasi Penyusunan Regulasi dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (PK-20)	1.00	kegiatan	437.450.000
		03	AEA.003 Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Pengalokasian dan Implementasi Pembiayaan Kesehatan (PK-20)	1.00	kegiatan	1.296.546.000
		04	AEA.004 Fasilitasi Dewan Pertimbangan Klinis	1.00	kegiatan	549.840.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	6804.AEF Sosialisasi dan Diseminasi	3.000,00	orang	1.777.514.000
Rincian Output	:	01	AEF.001 Orang yang Mendapatkan Advokasi Pembiayaan Kesehatan untuk Kegiatan Promotif dan Preventif	3000.00	orang	1.777.514.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	6804.DCM Pelatihan Bidang Kesehatan	300,00	Orang, Kegiatan	4.205.010.000
Rincian Output	:	01	DCM.001 Tenaga Koder FKRTL yang Mengikuti Pelatihan Koding dalam Program JKN	300.00	Orang	4.205.010.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	6804.FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Rekomendasi	240.000.000
Rincian Output	:	01	FAE.001 Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	1.00	Laporan	240.000.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	6804.FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	6,00	Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, Kab/Kota	1.928.980.000
Rincian Output	:	01	FBA.001 Penguatan Pelaksanaan Health Account (PHA/DHA) di Daerah (PK-17)	6.00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	1.928.980.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025
I A. INFORMASI KINERJA

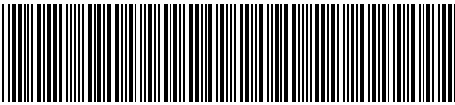


DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, Kab/Kota			
Program	:	024.11.DS	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan		255.376.673.000		
Kegiatan	:	6833	Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan		86.698.544.000		
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output	1 :	6833.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	31,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	8.519.233.000	
Rincian Output	:	01	ABG.011	Kajian Pengembangan Kebijakan Baru Bidang Upaya Kesehatan (LP-1)	5,00	Rekomendasi Kebijakan	933.350.000
		02	ABG.012	Kajian Evaluasi Kebijakan Tata Kelola dan Penguatan Mutu Layanan Kesehatan Primer (LP-1)	4,00	Rekomendasi Kebijakan	1.100.000.000
		03	ABG.013	Kajian Evaluasi Kebijakan Tata Kelola dan Penguatan Mutu Layanan Kesehatan Rujukan (LR-11)	4,00	Rekomendasi Kebijakan	1.100.000.000
		04	ABG.014	Kajian Evaluasi Kebijakan Program Kesehatan Masyarakat (LP-3)	4,00	Rekomendasi Kebijakan	1.100.000.000
		05	ABG.015	Kajian Evaluasi Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (LP-9)	4,00	Rekomendasi Kebijakan	1.100.000.000
		06	ABG.016	Kajian Evaluasi Kebijakan Promosi Kesehatan, Deteksi Dini dan Pengendalian PTM (LP-10)	4,00	Rekomendasi Kebijakan	990.208.000
		07	ABG.017	Evaluasi Kebijakan dan Strategi Upaya Kesehatan Masyarakat (LP-1)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	188.830.000
		08	ABG.018	Evaluasi Kebijakan dan Strategi Upaya Kesehatan Perseorangan (LP-1)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	100.000.000
		09	ABG.019	Evaluasi Kebijakan dan Strategi Tata Kelola Mutu Fasyankes Primer (LR-11)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	100.000.000
		10	ABG.020	Evaluasi Kebijakan dan Strategi Layanan Kesehatan Lanjutan dan Klinis (LP-1)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	171.624.000
		11	ABG.021	Evaluasi Kebijakan dan Strategi Tata Kelola dan Mutu Fasyankes Lanjutan (LR-11)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	175.000.000
		12	ABG.022	Rekomendasi Kebijakan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Terpadu Pemeriksaan Kesehatan Gratis (LP-1)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.460.221.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025
I A. INFORMASI KINERJA

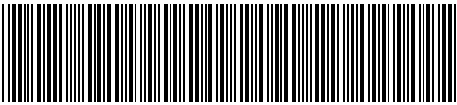


DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Kebijakan Bidang Kesehatan				Rekomendasi Kebijakan, Kajian	
Klasifikasi Rincian Output	2	6833.AEA	Koordinasi	8,00	kegiatan 2.899.311.000
Rincian Output		01 AEA.003	Penyusunan Perencanaan Kajian Kesehatan di Bidang Upaya Kesehatan	1.00	kegiatan 1.000.778.000
		02 AEA.004	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Bidang Upaya Kesehatan	1.00	kegiatan 1.098.523.000
		03 AEA.005	Quality Control Rancangan Regulasi Bidang Upaya Kesehatan	6.00	kegiatan 800.010.000
Klasifikasi Rincian Output	3	6833.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan	1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian 75.280.000.000
Rincian Output		01 PBG.004	Survei Konsumsi Makanan Individu (LP-4)	1.00	Kajian 75.280.000.000
Kegiatan		6834	Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan		12.738.787.000
Indikator Kinerja Kegiatan					
Klasifikasi Rincian Output	4	6834.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	25,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian 10.978.094.000
Rincian Output		01 ABG.041	Kajian Pengembangan Kebijakan Baru Bidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (RF-13)	4.00	Rekomendasi Kebijakan 3.566.184.000
		02 ABG.042	Kajian Evaluasi Kebijakan Sistem Ketahanan Alat Kesehatan (RF-15)	3.00	Rekomendasi Kebijakan 1.173.826.000
		03 ABG.043	Kajian Evaluasi Kebijakan Sistem Ketahanan Farmasi (RF-13)	3.00	Rekomendasi Kebijakan 1.181.054.000
		04 ABG.045	Kajian Evaluasi Kebijakan Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan (SDM-21)	3.00	Rekomendasi Kebijakan 1.111.854.000
		05 ABG.046	Kajian Evaluasi Kebijakan Penyediaan , Peningkatan Mutu, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan (SDM-23)	3.00	Rekomendasi Kebijakan 1.111.854.000
		06 ABG.047	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kebijakan Baru Bidang Sistem Ketahanan Kesehatan (HS-29)	1.00	Rekomendasi Kebijakan 19.000.000
		07 ABG.048	Rekomendasi Kebijakan Strategi Penanggulangan Kedaruratan	1.00	Rekomendasi Kebijakan 72.860.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025
I A. INFORMASI KINERJA

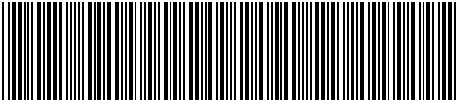


DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Kebijakan Bidang Kesehatan				Rekomendasi Kebijakan, Kajian	
		Kesehatan & Perubahan Iklim (HS 32)		1.00	Rekomendasi Kebijakan
08	ABG.049	Evaluasi Kebijakan Strategi Penanggulangan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan (HS 35)		1.00	Rekomendasi Kebijakan 893.330.000
09	ABG.050	Evaluasi Kebijakan Strategi Imunisasi, Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan (HS 29)		1.00	Rekomendasi Kebijakan 147.011.000
10	ABG.051	Evaluasi Kebijakan Sistem Ketahan dan Strategi Tata Kelola Keracunan (HS-29)		1.00	Rekomendasi Kebijakan 235.621.000
11	ABG.052	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kebijakan Baru Bidang Sistem Sumber Daya Kesehatan (SDM-21)		1.00	Rekomendasi Kebijakan 230.000.000
12	ABG.053	Rekomendasi Kebijakan dan Strategi SDM Kesehatan (SDM-21)		1.00	Rekomendasi Kebijakan 344.000.000
13	ABG.054	Rekomendasi Kebijakan dan Strategi Sistem Informasi Kesehatan (TK-31)		1.00	Rekomendasi Kebijakan 640.000.000
14	ABG.055	Rekomendasi Kebijakan dan Strategi Integrasi Sumber Daya Kesehatan (SDM-21)		1.00	Rekomendasi Kebijakan 251.500.000
Klasifikasi Rincian Output	5	6834.AEA Koordinasi		9,00	kegiatan 1.760.693.000
Rincian Output	01	AEA.004	Penyusunan Perencanaan Kajian Kesehatan bidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	1.00	kegiatan 550.230.000
	02	AEA.005	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan bidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	1.00	kegiatan 485.812.000
	03	AEA.006	Quality Control Rancangan Regulasi bidang Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	3.00	kegiatan 316.845.000
	04	AEA.007	Penyusunan Perencanaan Kajian Kesehatan bidang Sistem Ketahanan Kesehatan	1.00	kegiatan 131.691.000
	05	AEA.008	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan bidang Sistem Ketahanan Kesehatan	1.00	kegiatan 97.828.000
	06	AEA.010	Penyusunan Perencanaan Kajian Kesehatan Bidang Sistem Sumber Daya Kesehatan	1.00	kegiatan 86.987.000
	07	AEA.011	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Bidang Sistem Sumber Daya Kesehatan	1.00	kegiatan 91.300.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025
I A. INFORMASI KINERJA



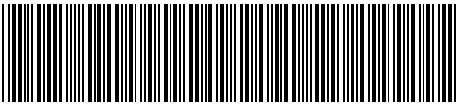
DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : I A. 5

Kegiatan	:	6835	Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan				15.523.394.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:							
Klasifikasi Rincian Output	6	:	6835.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan		17,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	13.214.183.000
Rincian Output	:	01	ABG.011	Kajian Pengembangan Kebijakan Baru Bidang Pembiayaan Jaminan Kesehatan dan Desentralisasi Kesehatan (PK-20)		1.00	Rekomendasi Kebijakan	509.880.000
		02	ABG.012	Rekomendasi Kebijakan Penataan Ulang Manfaat dalam Program JKN (PK-18)		1.00	Rekomendasi Kebijakan	800.150.000
		03	ABG.013	Rekomendasi Kebijakan Sinergi Pembiayaan Pusat dan Daerah (PK-20)		2.00	Rekomendasi Kebijakan	1.354.880.000
		04	ABG.014	Rekomendasi Kebijakan Health Technology Assesment (PK-19)		6.00	Rekomendasi Kebijakan	4.623.658.000
		05	ABG.015	Rekomendasi Kebijakan INA Grouper dalam Program JKN (PK-18)		1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.093.850.000
		06	ABG.016	Rekomendasi Kebijakan Annual Review dan Evaluasi Tarif INA CBG dalam Program JKN (PK-18)		1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.222.252.000
		07	ABG.017	Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Metode Pembayaran di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (PK-18)		1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.160.700.000
		08	ABG.018	Rekomendasi Kebijakan National Health Account (PK-17)		1.00	Rekomendasi Kebijakan	2.128.813.000
		09	ABG.019	Rekomendasi Kebijakan Kenaikan Investasi Kesehatan di bidang Farmasi (PK-20)		1.00	Rekomendasi Kebijakan	107.140.000
		10	ABG.020	Rekomendasi Kebijakan Kenaikan Investasi Kesehatan di bidang Alkes (PK-20)		1.00	Rekomendasi Kebijakan	152.860.000
		11	ABG.021	Rekomendasi Kebijakan Kenaikan Investasi Kesehatan di bidang Fasyankes (PK-20)		1.00	Rekomendasi Kebijakan	60.000.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	6835.AEA	Koordinasi		6,00	kegiatan	2.309.211.000
Rincian Output	:	01	AEA.001	Penyusunan Perencanaan Kajian Kesehatan Bidang Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan		1.00	kegiatan	491.475.000
		02	AEA.002	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Bidang Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan		1.00	kegiatan	837.800.000
		03	AEA.003	Quality Control Rancangan Regulasi Bidang Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan		3.00	kegiatan	546.360.000
		04	AEA.005	Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Pengalokasian dan Implementasi		1.00	kegiatan	433.576.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025
I A. INFORMASI KINERJA

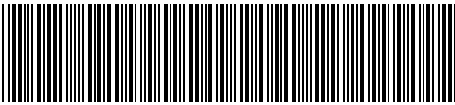


DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Koordinasi				kegiatan		
Pembiayaan Kesehatan				1.00	kegiatan	
Kegiatan	:	6836	Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan			134.533.760.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output	8	:	6836.ABG Kebijakan Bidang Kesehatan	18,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	4.881.150.000
Rincian Output	:	01	ABG.031 Kajian pengembangan kebijakan baru bidang Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan (TK-31)	2.00	Rekomendasi Kebijakan	393.240.000
		02	ABG.032 Kajian Evaluasi Kebijakan Kesehatan Bilateral (LR-11)	2.00	Rekomendasi Kebijakan	692.625.000
		03	ABG.033 Kajian Evaluasi Kebijakan Kesehatan Regional (HS-32)	2.00	Rekomendasi Kebijakan	693.638.000
		04	ABG.034 Kajian Evaluasi Kebijakan Kesehatan Multilateral (HS-32)	2.00	Rekomendasi Kebijakan	692.422.000
		05	ABG.035 Kajian Evaluasi Kebijakan Hibah dan Pinjaman (RF-14)	2.00	Rekomendasi Kebijakan	690.570.000
		06	ABG.036 Kajian Evaluasi Kebijakan Bioteknologi (TK-25)	2.00	Rekomendasi Kebijakan	687.742.000
		07	ABG.037 Kajian Evaluasi Kebijakan Sistem Informasi Kesehatan (TK-31)	2.00	Rekomendasi Kebijakan	692.422.000
		08	ABG.038 Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kebijakan baru bidang Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global (HS-32)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	175.150.000
		09	ABG.039 Evaluasi Kebijakan Mitra Pembangunan (RF-14)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	156.000
		10	ABG.040 Evaluasi Kebijakan Desentralisasi Kesehatan (PK-20)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	42.680.000
		11	ABG.041 Evaluasi Kebijakan Transformasi Kesehatan (HS-29)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	120.505.000
Klasifikasi Rincian Output	9	:	6836.AEA Koordinasi	6,00	kegiatan	2.004.165.000
Rincian Output	:	01	AEA.003 Penyusunan Perencanaan Kajian Kesehatan bidang Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	1.00	kegiatan	289.938.000
		02	AEA.004 Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan bidang Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	1.00	kegiatan	1.042.189.000
		03	AEA.005 Quality Control Rancangan Regulasi bidang Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	2.00	kegiatan	335.920.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025
I A. INFORMASI KINERJA

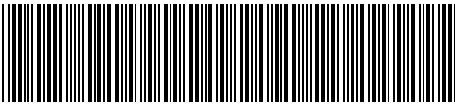


DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Koordinasi				kegiatan		
	04	AEA.006	Penyusunan Perencanaan Kajian Kesehatan bidang Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global	1.00	kegiatan	192.742.000
	05	AEA.007	Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan bidang Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global	1.00	kegiatan	143.376.000
Klasifikasi Rincian Output	10	6836.AEC	Kerja sama	56,00	Kesepakatan, Dokumen, Kegiatan	114.910.623.000
Rincian Output	:	01	AEC.003 Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Multilateral Bidang Kesehatan (HS 32)	3.00	Kesepakatan	887.362.000
		02	AEC.005 Dokumen Pinjaman Hibah Luar Negeri (HS 32)	3.00	Kesepakatan	598.081.000
		03	AEC.006 Dokumen Kerja Sama Bioteknologi dan Informatika Kesehatan (TK 25)	2.00	Kesepakatan	1.957.981.000
		04	AEC.011 Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Regional Bidang Kesehatan (RF 14)	14.00	Kesepakatan	3.058.641.000
		05	AEC.012 Dokumen Kerja Sama Luar Negeri Bilateral Bidang Kesehatan (RF 14)	15.00	Kesepakatan	928.432.000
		06	AEC.013 Kontribusi Indonesia Pada Organisasi Internasional Non Pemerintah (HS 32)	2.00	Dokumen	98.743.000.000
		07	AEC.014 Operasionalisasi ACPHEED (HS 29)	1.00	Dokumen	8.056.466.000
		08	AEC.015 Dokumen Mitra Pembangunan Kesehatan (HS-32)	16.00	Kesepakatan	680.660.000
Klasifikasi Rincian Output	11	6836.AEG	Konferensi dan Event	22,00	Kegiatan, Paket Kegiatan	12.737.822.000
Rincian Output	:	01	AEG.001 Tuan Rumah Penyelenggaraan Pertemuan Internasional (HS 32)	2.00	Kegiatan	6.213.791.000
		02	AEG.003 Partisipasi aktif dalam Sidang Internasional Bilateral, Regional dan Multilateral Bidang Kesehatan (HS 32)	20.00	Kegiatan	6.524.031.000
Kegiatan	:	6837	Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan			5.882.188.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025
I A. INFORMASI KINERJA

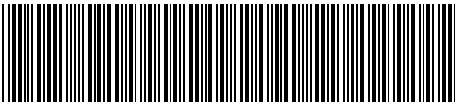


DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Klasifikasi Rincian Output	12	:	6837.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	2,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	3.247.286.000
Rincian Output		:	01	ABG.001 Analisis Situasi Kesehatan	2.00	Rekomendasi Kebijakan	3.247.286.000
Klasifikasi Rincian Output	13	:	6837.AEA	Koordinasi	2,00	kegiatan	2.634.902.000
Rincian Output		:	01	AEA.001 Advokasi dan Komunikasi Kebijakan Kesehatan	1.00	kegiatan	1.382.302.000
		:	02	AEA.002 Integrasi Kebijakan Pembangunan Kesehatan	1.00	kegiatan	1.252.600.000
Program		:	024.11.WA	Program Dukungan Manajemen			73.123.731.000
Kegiatan		:	6797	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan			73.123.731.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:					
Klasifikasi Rincian Output	1	:	6797.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,00	Unit	615.830.000
Rincian Output		:	01	CAN.951 Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	6.00	Unit	615.830.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	6797.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,00	Unit	1.266.072.000
Rincian Output		:	01	CCL.951 Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	6.00	Unit	1.266.072.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	6797.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	19,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	63.104.660.000
Rincian Output		:	01	EBA.956 Layanan BMN	1.00	Layanan	373.818.000
		:	02	EBA.957 Layanan Hukum	1.00	Layanan	608.050.000
		:	03	EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	3.00	Layanan	909.276.000
		:	04	EBA.959 Layanan Protokoler	1.00	Layanan	379.829.000
		:	05	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00	Layanan	327.052.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Layanan Dukungan Manajemen Internal				Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		
	06	EBA.962	Layanan Umum	5.00	Layanan	5.766.160.000
	07	EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1.00	Layanan	161.002.000
	08	EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	5.00	Layanan	136.495.000
	09	EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	54.442.978.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	6797.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	12,00	Unit, m2, Paket	1.288.314.000
Rincian Output	:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	12.00	Unit	1.288.314.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	6797.EBC Layanan Manajemen SDM Internal	844,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	3.682.608.000
Rincian Output	:	01	EBC.954 Layanan Manajemen SDM	564.00	Orang	1.155.699.000
		02	EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	280.00	Orang	2.526.909.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	6797.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	15,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	3.166.247.000
Rincian Output	:	01	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6.00	Dokumen	1.273.945.000
		02	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3.00	Dokumen	597.937.000
		03	EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	2.00	Dokumen	742.474.000
		04	EBD.961 Layanan Reformasi Kinerja	3.00	Dokumen	451.369.000
		05	EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.00	Dokumen	100.522.000

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP. 196811301994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025
I B. SUMBER DANA



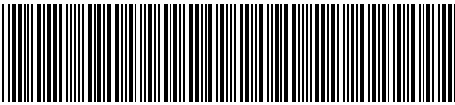
Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	339.979.964.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	339.979.964.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



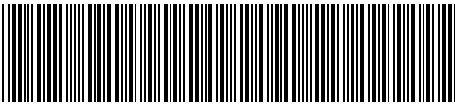
DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
416151	KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN	-	339.043.910	936.054	-	-	339.979.964	01 . 51	
024.11.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	-	11.479.560	-	-	-	11.479.560		
6804	Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	-	11.479.560	-	-	-	11.479.560		
6804.AEA	Koordinasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.328.056	-	-	-	3.328.056		
01	RM	-	3.328.056	-	-	-	3.328.056		
6804.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.777.514	-	-	-	1.777.514		
01	RM	-	1.777.514	-	-	-	1.777.514		
6804.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	4.205.010	-	-	-	4.205.010		
01	RM	-	4.205.010	-	-	-	4.205.010		
6804.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	240.000	-	-	-	240.000		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

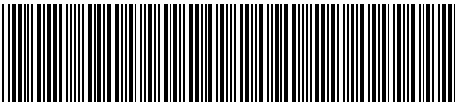


DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	240.000	-	-	-	240.000	182@	
6804.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.928.980	-	-	-	1.928.980	01 . 51	
01 RM		-	1.928.980	-	-	-	1.928.980	182@	
024.11.DS	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	-	254.998.673	378.000	-	-	255.376.673		
6833	Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan	-	86.320.544	378.000	-	-	86.698.544		
6833.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	8.519.233	-	-	-	8.519.233	01 . 51	
01 RM		-	8.519.233	-	-	-	8.519.233	182@	
6833.AEA	Koordinasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.899.311	-	-	-	2.899.311	01 . 51	
01 RM		-	2.899.311	-	-	-	2.899.311	182@	
6833.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	74.902.000	378.000	-	-	75.280.000	01 . 51	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



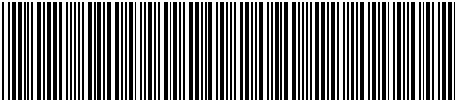
DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	74.902.000	378.000	-	-	75.280.000	182@	
6834	Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	-	12.738.787	-	-	-	12.738.787		
6834.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	10.978.094	-	-	-	10.978.094	01 . 51	
01 RM		-	10.978.094	-	-	-	10.978.094	182@	
6834.AEA	Koordinasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.760.693	-	-	-	1.760.693	01 . 51	
01 RM		-	1.760.693	-	-	-	1.760.693	182@	
6835	Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	-	15.523.394	-	-	-	15.523.394		
6835.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	13.214.183	-	-	-	13.214.183	01 . 51	
01 RM		-	13.214.183	-	-	-	13.214.183	182@	
6835.AEA	Koordinasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.309.211	-	-	-	2.309.211	01 . 51	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



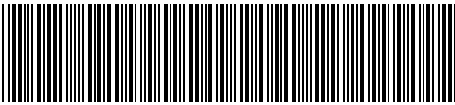
DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	2.309.211	-	-	-	2.309.211	182@	
6836	Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	-	134.533.760	-	-	-	134.533.760		
6836.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	4.881.150	-	-	-	4.881.150	01 . 51	
01 RM		-	4.881.150	-	-	-	4.881.150	182@	
6836.AEA	Koordinasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.004.165	-	-	-	2.004.165	01 . 51	
01 RM		-	2.004.165	-	-	-	2.004.165	182@	
6836.AEC	Kerja sama (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	114.910.623	-	-	-	114.910.623	01 . 51	
01 RM		-	114.910.623	-	-	-	114.910.623	182@	
6836.AEG	Konferensi dan Event (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	12.737.822	-	-	-	12.737.822	01 . 51	
01 RM		-	12.737.822	-	-	-	12.737.822	182@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

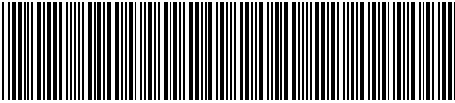


DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6837	Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	-	5.882.188	-	-	-	5.882.188		
6837.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.247.286	-	-	-	3.247.286	01 . 51	
01 RM		-	3.247.286	-	-	-	3.247.286	182@	
6837.AEA	Koordinasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.634.902	-	-	-	2.634.902	01 . 51	
01 RM		-	2.634.902	-	-	-	2.634.902	182@	
024.11.WA	Program Dukungan Manajemen	-	72.565.677	558.054	-	-	73.123.731		
6797	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	-	72.565.677	558.054	-	-	73.123.731		
6797.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	597.010	18.820	-	-	615.830	01 . 51	
01 RM		-	597.010	18.820	-	-	615.830	182@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN

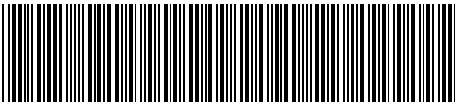


DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6797.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.266.072	-	-	-	1.266.072	01 . 51	
01	RM	-	1.266.072	-	-	-	1.266.072	182@	
6797.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	63.052.160	52.500	-	-	63.104.660	01 . 51	
01	RM	-	63.052.160	52.500	-	-	63.104.660	182@	
6797.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	801.580	486.734	-	-	1.288.314	01 . 51	
01	RM	-	801.580	486.734	-	-	1.288.314	182@	
6797.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.682.608	-	-	-	3.682.608	01 . 51	
01	RM	-	3.682.608	-	-	-	3.682.608	182@	
6797.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.166.247	-	-	-	3.166.247	01 . 51	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Kewenangan : (KP)

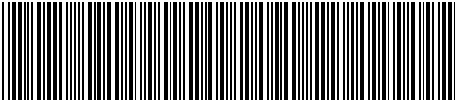
Halaman : II. 7
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN	JUMLAH SELURUH		
1	2	[51] 3	[52] 4	[53] 5	[57] 6	[58] 7	8	9	10
01 RM		-	3.166.247	-	-	-	3.166.247	182@	
JUMLAH		-	339.043.910	936.054	-	-	339.979.964		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP. 196811301994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



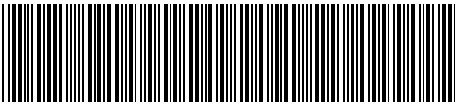
DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	416151	KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.144.121	2.900.650	20.897.709	4.043.662	3.960.314	3.521.699	5.023.297	6.299.625	88.272.302	9.779.501	11.448.259	182.688.822	339.979.964
		BELANJA BARANG	1.144.121	2.900.650	20.897.709	3.923.803	3.958.113	3.502.433	5.022.905	6.286.292	88.218.176	9.776.958	11.444.714	181.968.034	339.043.910
		BELANJA MODAL	0	0	0	119.859	2.201	19.266	392	13.333	54.126	2.543	3.545	720.788	936.054
		Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.479.560	11.479.560
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.479.560	11.479.560
		024.11.DG.6804 Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan	82.475	98.206	180.438	185.589	185.589	210.020	528.286	770.004	862.027	748.550	808.183	82.039.178	86.698.544
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	82.475	98.206	180.438	185.589	185.589	210.020	528.286	770.004	862.027	748.550	808.183	81.661.178	86.320.544
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378.000	378.000
		024.11.DS.6834 Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	25.712	30.665	49.642	91.693	95.731	71.431	452.447	559.791	506.851	1.056.505	385.677	9.412.641	12.738.787
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	25.712	30.665	49.642	91.693	95.731	71.431	452.447	559.791	506.851	1.056.505	385.677	9.412.641	12.738.787
		024.11.DS.6835 Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan	237.286	270.810	237.286	69.813	69.813	69.813	131.421	111.607	531.096	744.863	1.040.702	12.008.884	15.523.394
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	237.286	270.810	237.286	69.813	69.813	69.813	131.421	111.607	531.096	744.863	1.040.702	12.008.884	15.523.394
		024.11.DS.6836 Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan	0	47.776	16.589.007	3.450	130.976	217.027	457.004	2.161.571	82.837.452	1.551.983	3.542.719	26.994.795	134.533.760
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	47.776	16.589.007	3.450	130.976	217.027	457.004	2.161.571	82.837.452	1.551.983	3.542.719	26.994.795	134.533.760
		024.11.DS.6837 Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	0	0	16.997	0	0	8.282	38.559	125.749	12.043	111.591	127.286	5.441.681	5.882.188

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : (11) BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (416151) KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

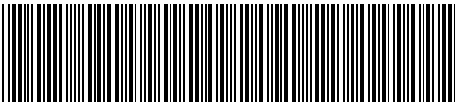
Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
024.11.WA.6797		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	16.997	0	0	8.282	38.559	125.749	12.043	111.591	127.286	5.441.681	5.882.188
		Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	798.648	2.453.193	3.824.340	3.693.117	3.478.205	2.945.126	3.415.580	2.570.904	3.522.833	5.566.009	5.543.692	35.312.083	73.123.731
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	798.648	2.453.193	3.824.340	3.573.258	3.476.004	2.925.860	3.415.188	2.557.570	3.468.707	5.563.466	5.540.147	34.969.295	72.565.677
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	119.859	2.201	19.266	392	13.333	54.126	2.543	3.545	342.788	558.054

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP. 196811301994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025
IV A. B L O K I R



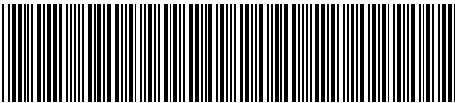
DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : [11] BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [416151] KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
416151	KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 947.520
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 172.635.987		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025
	52 Belanja Barang Rp. 172.089.470		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
024.11.DG	53 Belanja Modal Rp. 546.517	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 577.850
	Pelaksanaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025
6804	Koordinasi	6804.AEF	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM)		Sosialisasi dan Diseminasi
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 110.970		521211 Belanja Bahan(RM)
6804.AEA	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 547.884
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 55.000	522141	Belanja Sewa(RM)
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 75.000
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025
522151	Belanja Jasa Profesi(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 118.100		522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 56.900
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524111	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.411.456		Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 953.730
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 107.160	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 144.000
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025
IV A. B L O K I R



DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : [11] BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [416151] KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6804.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	6804.FBA	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM)		Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 129.000		521211 Belanja Bahan(RM)
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.580
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025
	522141 Belanja Sewa(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.600		522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 47.000
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 179.400		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 234.750
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025
6804.FAE	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	024.11.DS 6833 6833.ABG	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 228.600		Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025		Perumusan Kebijakan Upaya Kesehatan
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Bidang Kesehatan
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		521211 Belanja Bahan(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 240.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 300.613
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.406.410		
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 240.000		
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025		

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : [11] BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker : [416151] KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : IV.A. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN			KODE	URAIAN				
6833.AEA	522131	Belanja Jasa Konsultan(RM)		6833.PBG	522151	Belanja Jasa Profesi(RM)			
		Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 463.950				Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 152.648	
		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025				Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
	522151	Belanja Jasa Profesi(RM)			524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)			
		Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 505.600				Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 98.226	
		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025				Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
	522191	Belanja Jasa Lainnya(RM)			524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)			
		Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 1.991.320				Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 21.060	
		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025				Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025			
	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)			524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)			
		Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 805.435				Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 504.000	
		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025				Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)					
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 19.040			Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 378.316			
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)			Kebijakan Bidang Kesehatan					
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 2.178.000		521211	Belanja Bahan(RM)				
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025					Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 154.027		
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025				
	Koordinasi			Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				
521211	Belanja Bahan(RM)			522191	Belanja Jasa Lainnya(RM)				
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 162.000				Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 67.768.773		
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025				Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025				
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN

Unit Organisasi : [11] BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

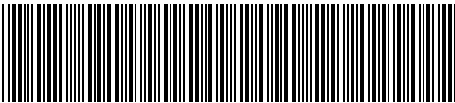
Provinsi : [01] DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker : [416151] KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : IV.A. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN			KODE	URAIAN		
6834 6834.ABG	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		6834.AEA	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
		Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 2.331.000		522191	Belanja Jasa Lainnya(RM)	
		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025				Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 200.000
	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025	
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)			Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
		Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 79.800		524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	
		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025				Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 3.733.352
	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025	
	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)			Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
		Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 864.000		524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	
		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025				Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 253.120
	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025	
	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)			Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
		Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 3.704.400		524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)	
		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025				Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 2.494.080
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025			
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM)		Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 378.000	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)			
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025			Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 682.048		
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025			
6834	Perumusan Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan			Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
6834.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan			Koordinasi			
	521211	Belanja Bahan(RM)		521211	Belanja Bahan(RM)		
		Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 76.600		Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 26.850	
		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025			Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025		
	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522151	Belanja Jasa Profesi(RM)		522151	Belanja Jasa Profesi(RM)		
		Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 574.400		Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 122.000	
		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025			Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025
IV A. B L O K I R



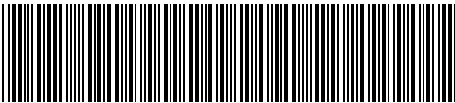
DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : [11] BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [416151] KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : IV.A. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6835	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	6835.AEA	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 519.735		522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.000.000
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.200		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.143.494
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 248.382		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 35.700
6835.ABG	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	6835.AEA	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 304.233		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.109.720
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025
	6835 Perumusan Kebijakan Pembiayaan, Jaminan dan Desentralisasi Kesehatan		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Bidang Kesehatan		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	521211 Belanja Bahan(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.351.925
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 257.835		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Koordinasi
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)		521211 Belanja Bahan(RM)
6835.AEA	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 685.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 75.735
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
6835.AEA	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.771.800		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 95.200

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025
IV A. B L O K I R



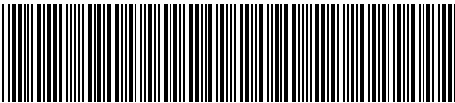
DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : [11] BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [416151] KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : IV.A. 6
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6836	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025	6836.AEA	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 348.600
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 477.660		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.376.000
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 266.400		Koordinasi
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025		521211 Belanja Bahan(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.720
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 960.640		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025		522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 18.000
6836	Perumusan Kebijakan Kesehatan Global dan Teknologi Kesehatan		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
6836.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 135.270		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 99.600
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 453.600		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 818.800
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.229.189		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 665.718
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025
IV A. B L O K I R



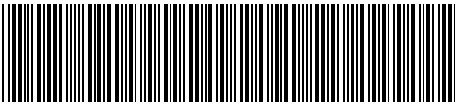
DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : [11] BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [416151] KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : IV.A. 7
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6836.AEC	Kerja sama		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM)	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 95.154	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 68.300	
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025	
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)	522141 Belanja Sewa(RM)	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 83.300	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 726.701	
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025	
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.234.297	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 51.300	
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025	
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)	
6836.AEG	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 250.678	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.626.309	
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025	
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.186.000	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 59.572	
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025	
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.203.750	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 134.440	
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025	
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Konferensi dan Event	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)	
	521211 Belanja Bahan(RM)	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.454.930	
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 98.460	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025	
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025
IV A. B L O K I R



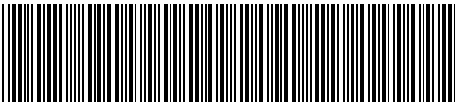
DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : [11] BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [416151] KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : IV.A. 8
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6837 6837.ABG	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	6837.AEA	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 321.000		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 377.428
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.176.114		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.683.182
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	6837 Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Bidang Kesehatan		Koordinasi
	521211 Belanja Bahan(RM)		521211 Belanja Bahan(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 28.604		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 162.399
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025
6837.ABG	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	6837.AEA	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)		521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 272.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.235
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)		522131 Belanja Jasa Konsultan(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 100.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 120.000
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 358.828		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 63.600
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.040		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 395.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025
IV A. B L O K I R



DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : [11] BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [416151] KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

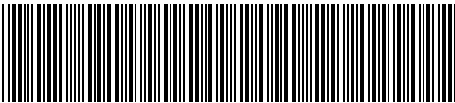
KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
024.11.WA 6797 6797.CAN	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025	6797.CCL	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 104.386
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 425.608		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025		OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521211 Belanja Bahan(RM)
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 30.060
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 43.110		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 20.600
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 362.880		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)
6797	Program Dukungan Manajemen	6797	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 445.200
	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025
	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)		523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 122.754		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 148.386
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522141 Belanja Sewa(RM)		523199 Belanja Pemeliharaan Lainnya(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 280.680		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 79.380
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025
6797	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
			524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
6797		6797	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.914
			Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
6797		6797	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

DS:4346-1409-0260-1982

Halaman : IV.A. 10
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6797.EBA	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.610 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 130.900 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 72.000 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.956.474 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.004 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.615.779 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 137.256 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	522111 Belanja Langganan Listrik(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 496.992 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 57.539 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	522141 Belanja Sewa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 666.820 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 20.799 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 127.400 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 804.307 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.972.455 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025
IV A. B L O K I R

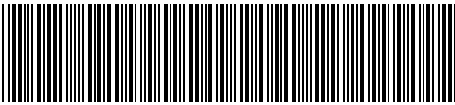


DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : [11] BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [416151] KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Bangunan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 528.264 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.966.816 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.143.961 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 212.548 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 542.940 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 288.184 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.617.576 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	6797.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal 522141 Belanja Sewa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 481.680 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 168.517 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		6797.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 254.137 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 700.110 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 57.600 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 753.030 Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 195.270 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025
IV A. B L O K I R



DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : [11] BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [416151] KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

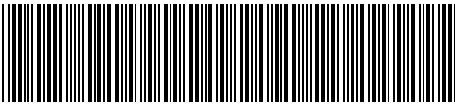
Halaman : IV.A. 12
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
6797.EBD	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 378.200		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 817.423
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 902.358		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 139.864
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM)		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 151.200		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 711.177
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Layanan Manajemen Kinerja Internal		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	521211 Belanja Bahan(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 534.966
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 299.754		Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 215.600		
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1Tahun2025		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 80.000		
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 105.200		
	Penghematan/Efisiensi sesuai Inpres No 1 Tahun 2025		

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP. 196811301994031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 024.11.1.416151/2025
IV B. C A T A T A N



DS:4346-1409-0260-1982

Kementerian Negara/Lembaga : [024] KEMENTERIAN KESEHATAN
Unit Organisasi : [11] BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [416151] KANTOR PUSAT BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Kunta Wibawa Dasa Nugraha
NIP. 196811301994031001

DAFTAR KONTRIBUTOR

Penasihat

Prof. Asnawi Abdullah, Ph.D. (Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan)

Penanggung Jawab

dr. Etik Retno Wiyati, MARS., M.H (Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan)

Tim Penyusun

Tri Ramadhany (Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan)

Sari Ramadhani (Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan)

Fairuz Wardaty (Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan)

Titin Delia (Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan)

Martin Lasty Marbun (Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan)

Kontributor

Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan

Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan

Pusat Kebijakan Sistem Sumber Daya Kesehatan

Pusat Kebijakan Strategi dan Tata Kelola Kesehatan Global

